TABLOID
SinarTani

TERBIT SETIAP HARI RABU
Harga Tabloid Cetak : Rp 16.000
E-paper : Rp 72.000/Tahun (48 edisi)
www.tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 081317575066
e-mail : redaksi@sinartani.co.id
www.sinartani.co.id

Edisi 3 - 9 September 2025
No. 4101
Tahun LVI



8 Beras Khusus Beredar, Beras Premium Menipis

10 Herning, Kenalkan Sorgum di Lahan Gambut

13 Teknologi, Kunci Sukses Bertani di Lahan Rawa



SALURKAN PUPUK SUBSIDI, PERKUAT GAPOKTAN DAN KDMP

www.tabloidsinartani.com tabloidsinartani.com @SinarTaniST tabloidsinartani SINTA TV



EDITORIAL

Kopdes Merah Putih **dan Pupuk Bersubsidi**

Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan aturan baru terkait pupuk bersubsidi dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang diundangkan dan berlaku sejak 30 Januari 2025.

Perpres ini memastikan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat penerima. Lebih penting lagi untuk menyokong target swasembada pangan.

Sebagai peraturan pelaksana Perpres tersebut, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 15 tahun 2025 tentanag Peraturan Pelaksana Perpres. Dalam tata kelola pupuk bersubsidi yang baru tersebut, pemerintah membuat mekanisme titik serah pupuk bersubsidi. Skema ini menjadi simpul kendali baru agar pengawasan distribusi lebih jelas dan akuntabel.

Dengan menetapkan titik serah, pemerintah berharap dapat memotong mata rantai distribusi pupuk yang selama ini dinilai terlalu panjang. Jika sebelumnya harus melalui berbagai lini dari mulai produsen, distributor, agen, kemudian kios pengecer, baru ke petani.

Kini distriburi pupuk bersubisi langsung dari produsen pupuk ke titik serah, dalam hal ini kios pengecer atau gabungan kelompok tani (Gapoktan). Paling baru, pemerintah membuka kesempatan bagi Koperasi Desa Merah Putih menjadi penyalur pupuk subsidi. Skema ini menjadi simpul kendali baru agar pengawasan distribusi lebih jelas dan akuntabel.

Sebagai lembaga ekonomi yang berada di tingkat paling bawah yakni desa, Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih memang diharapkan dapat memperkuat sistem distribusi pupuk subsidi yang selama ini menjadi penopang produktivitas pertanian. Kehadiran KDMP di setiap desa, diharapkan makin mendekatkan petani dengan titik serah pupuk bersubsidi.

Kementerian Koperasi seperti diungkapkan Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono terus mendorong penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai mitra strategis dalam rantai pasok pupuk bersubsidi, sehingga dapat membantu upaya pengendalian program distribusi pupuk.

Meski pemerintah telah memberikan lampu hijau kepada Kopdes Merah Putih sebagai penyalur pupuk subsidi, tapi bukan persoalan mudah. Pasalnya, untuk menjadi penyalur pupuk subsidi sebagai Kios Pupuk, Kopdes Merah Putih harus memenuhi beberapa persyaratan. Diantaranya, izin usaha perdagangan, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 47763 atau sesuai bidangnya, rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat, serta memiliki gudang penyimpanan yang sesuai standar.

KDMP juga harus terdaftar sebagai pengecer resmi di distributor lokal, memiliki gudang, dan jaringan distribusi ke petani atau kelompok tani. Hingga 18 Agustus 2025, tercatat 80.605 Kopdes berbadan hukum, namun baru 35.343 unit memiliki akun Microsite, dan hanya 2.921 unit yang aktif memperbaharui data.

Sebagai barang subsidi, ternyata pihak PT Pupuk Indonesia juga tidak akan sembarangan menentukan calon titik serah. Penerima pupuk pada titik serah akan menjalani tiga tahap utama. *Pertama*, proses pendaftaran dan verifikasi hingga penunjukan resmi dan penandatanganan SPJB. *Kedua,* tahap transaksi dan evaluasi dimana pelaku usaha menebus pupuk dan menyalurkannya melalui sistem digital. *Ketiga*, kewajiban menyampaikan laporan penyaluran secara rutin yang juga dilakukan melalui sistem digital.

Dengan berbagai ketentuan dan syarat, baik Gapoktan maupun Kopdes Merah Putih harus benar-benar menyiapkan berbagai persyaratan sebagai titik serah. Apalagi banyak Kopdes Merah Putih dan Gapoktan yang dari sisi bisnis belum siap. Ini menjadi Pekerjaan Rumah.

SAUNG TANI

Jadi penyalur pupuk bersubsidi, Pemerintah perkuat posisi gapoktan dan Kopdes Merah Putih
- Berarti selama ini belum kuat ya?

Beras Premium mulai menghilang di pasar modern, kini beredar beras khusus
- Pinter-pinternya pengusaha

Konsumen keluhkan mutu beras SPHP
- Gara-gara terlalu lama disimpen

MENTAN MENYAPA



Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI

Produksi Beras, **Bukti Nyata !**

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja meliris angka produksi beras nasional hingga Oktober 2025. BPS memperkirakan mencapai 31,04 juta ton. Angka ini berhasil melampaui total produksi sepanjang tahun 2024 yang tercatat sebesar 30,62 juta ton, sekaligus menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 12,16 persen dibandingkan periode Januari–Oktober 2024 yang hanya mencapai 27,67 juta ton.

Peningkatan produksi ini ditopang oleh meluasnya areal panen padi yang kini mencapai 10,22 juta hektar, naik 11,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 9,13 juta hektar. Saya melihat capaian tersebut merupakan bukti nyata dari keberhasilan strategi optimalisasi lahan yang selama ini dijalankan pemerintah.

Optimalisasi lahan menjadi kunci sukses peningkatan produksi beras yang signifikan. Dari yang sebelumnya hanya mampu tanam sekali setahun, kini indeks pertanaman padi bisa meningkat menjadi dua hingga tiga kali setahun.

Langkah optimalisasi lahan ditempuh dengan berbagai cara, mulai dari rehabilitasi lahan tidur, pengelolaan irigasi yang lebih efisien, hingga penerapan teknologi pertanian modern. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan lahan suboptimal seperti rawa dan lahan kering agar lebih produktif melalui teknik budidaya inovatif, sehingga siklus tanam dapat berlangsung lebih sering dengan hasil yang lebih tinggi.

Selain keberhasilan strategi pengelolaan lahan, kondisi iklim yang lebih bersahabat pada tahun ini turut mendukung produktivitas petani. Panen raya yang berlangsung serentak di sejumlah wilayah sentra produksi utama seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi semakin memperkuat surplus produksi beras yang dicatat hingga Oktober 2025.

Optimisme atas capaian ini juga datang dari lembaga internasional. FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2025/2026 mencapai 35,6 juta ton, yang merupakan rekor tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Sementara itu, USDA dalam laporan Rice Outlook April 2025 memperkirakan produksi beras Indonesia akan mencapai 34,6 juta ton, atau meningkat 4,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua proyeksi tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen beras terbesar di dunia.

Dengan capaian hingga Oktober 2025 yang diperkirakan menembus 31,04 juta ton, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mewujudkan swasembada beras. Surplus yang dihasilkan tidak hanya dapat menjaga stabilitas harga di pasar, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

BPS meyakini tren positif ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun seiring dengan musim tanam kedua dan ketiga yang sedang berjalan. Karena itu, pemerintah akan terus menjaga momentum peningkatan produksi melalui penyediaan sarana produksi pertanian, penguatan sistem pengairan dan pompanisasi, serta pemanfaatan kondisi iklim yang menguntungkan di tahun ini. Upaya tersebut diharapkan semakin memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengokohkan langkah Indonesia menuju swasembada beras.

Kenaikan NTP yang diungkapkan BPS juga menunjukkan bahwa daya beli petani terus membaik. Angka tersebut menandakan petani memiliki surplus, yang mana nilai produksi yang diterima lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan. Namun, keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja bersama antara pemerintah, petani, dan berbagai pemangku kepentingan. **

PINDAI BARCODE!
Untuk Mengakses e-paper Sinartani.



Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: Freepik.com (diolah)

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto; **Redaktur Pelaksana :** Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden :** Wasis (Cilacap), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat); **Layoutman :** Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter**: Asrori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi:** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** Dewi Ratnawati; Indri; Echa Sinaga; **Keuangan:** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan** : Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi:** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari
Penerbit: PT. Duta Karya Swasta; Komisaris Utama: DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; **Komisaris:** Ir. Achmad Saubari Prasodjo
Direktur Utama: DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur:** Ir. Mulyono Machmur, MS
Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan: Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205
Email: redaksi@sinartani.co.id; **Izin Terbit** No. 208/SK/Menpen/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak:** Laksus Pangkopkamtibda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga:** Rp. 16.000 per edisi; **Tarif Iklan: FC** Rp. 8000/mmk, **BW** Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran:** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. No rekening 1270096016587; Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI'46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN:** 0852-8586;
Percetakan: PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika

Tata Kelola Pembelian TBS Sawit:

Panduan Baru untuk **Pekebun Mitra**



Ruliadi Saragih

Di desa-desa sentra sawit, Tandan Buah Segar (TBS) bukan sekadar buah di pohon, tapi "emas merah" yang menjadi nadi ekonomi keluarga. Dari TBS inilah lahir minyak sawit mentah (CPO), inti sawit (PK), dan beragam produk turunan yang menembus pasar dunia.

Tapi, perjalanan TBS dari kebun ke pabrik pengolahan (PKS) bukan sekadar urusan panen dan jual. Ada tata kelola yang harus dipahami agar petani mitra mendapat harga adil, kepastian pasar, dan perlindungan hukum.

Pemerintah lewat Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 13 Tahun 2024 memberi panduan jelas mengenai mekanisme pembelian TBS dari pekebun mitra.

Sejak lama, petani sawit kerap berada di posisi lemah saat menjual TBS. Harga sering kali ditentukan sepihak, mutu diperdebatkan, dan akses ke pabrik kelapa sawit (PKS) tidak selalu mudah.

Aturan ini menggantikan pedoman lama (Permentan 01/2018) dengan tujuan lebih jelas: melindungi pekebun mitra, memastikan harga yang adil, menghindari praktik persaingan tidak sehat, sekaligus menjaga keberlanjutan perkebunan sawit nasional.

Dalam aturan ini, pekebun mitra dibagi dua, yaitu Pekebun Plasma, yaitu mereka yang tergabung dalam program perusahaan, biasanya sudah mendapat bantuan bibit, pupuk, hingga penyuluhan.

Kedua adalah Pekebun Swadaya, petani yang mengelola kebunnya secara mandiri, namun tetap bisa bermitra dengan PKS melalui perjanjian pembelian TBS.

Keduanya diikat dalam perjanjian kerja sama, minimal selama 1 siklus tanam untuk plasma, dan 2 tahun untuk swadaya. Perjanjian itu harus memuat identitas, hak, kewajiban, mutu buah, hingga syarat penerimaan di PKS.

Hak dan Kewajiban

Peraturan ini menekankan bahwa hubungan antara pekebun dan PKS harus saling menguntungkan.

Ada hak pekebun, ada juga hak PKS, begitu pula kewajiban masing-masing pihak.

- Hak pekebun: jaminan pemasaran TBS, pembayaran sesuai harga resmi, serta kepastian volume dan waktu penerimaan.
- Hak PKS: berhak mendapat pasokan dari pekebun mitra dan menolak TBS yang tidak sesuai mutu.
- Kewajiban pekebun: wajib menjual TBS hanya ke PKS mitra sesuai kesepakatan.
- Kewajiban PKS: wajib membeli TBS pekebun mitra dengan harga resmi yang ditetapkan pemerintah daerah.

Penentuan Harga TBS

Aturan baru kini menjawab kebutuhan itu dengan formula resmi yang lebih transparan, sehingga harga tidak lagi ditentukan sepihak oleh pabrik atau tengkulak.

Secara umum, harga penjualan CPO (*Crude Palm Oil*) dan PK (*Palm Kernel*) yang menjadi dasar perhitungan TBS mengacu pada penjualan periode sebelumnya di pabrik kelapa sawit (PKS) mitra. Data historis dianggap paling mendekati kondisi nyata pasar. Dengan begitu, pekebun tidak lagi merasa harga datang dari "langit-langit", melainkan dari transaksi riil yang memang sudah terjadi.

Namun, ada kalanya PKS mitra tidak memiliki data penjualan yang bisa dijadikan acuan. Situasi lain yang juga mungkin terjadi adalah adanya perbedaan harga lebih dari 2,5 persen di antara anggota tim penetapan harga. Dalam kondisi seperti ini, aturan tidak membiarkan penentuan harga berjalan liar, melainkan menyediakan alternatif rujukan yang sahih.

Data bisa diambil dari rata-rata penjualan CPO dan PK milik PKS lain yang tergabung dalam tim penetapan harga, atau dari kantor Pemasaran Bersama yang dikelola BUMN, bahkan dari catatan resmi Bursa CPO Indonesia.

Harga TBS kini tidak lagi ditentukan sepihak, melainkan ditetapkan dengan sebuah rumus resmi. Rumus ini memperhitungkan tiga komponen penting yang saling terkait.

Pertama adalah Indeks K, yakni proporsi bagi hasil yang menjadi hak pekebun dari total pendapatan penjualan. Kedua, rendemen CPO dan PK, yaitu persentase minyak kasar dan inti sawit yang dapat dihasilkan dari setiap ton TBS.

Ketiga, harga penjualan CPO dan PK itu sendiri, yang harus mengacu pada transaksi aktual, baik dari pabrik kelapa sawit mitra, BUMN, maupun dari Bursa CPO Indonesia.

Poin terakhir yang ditegaskan adalah bahwa harga pembelian TBS produksi pekebun mitra dihitung di level PKS. Artinya, harga dasar yang digunakan untuk menghitung hak pekebun adalah harga yang berlaku saat TBS masuk ke pabrik, bukan harga di tengkulak atau jalur distribusi lain.

Hal ini penting karena memastikan petani menerima harga lebih transparan, tanpa terlalu banyak potongan di tengah jalan.

Penulis: Joko Samiyono
Penyuluh Pertanian Pusat

Kelola Penggilingan Padi, Menengok India

CATATAN Begawan



Penggilingan padi tenaga surya SEMA Alto membantu petani memperoleh beras 30 persen lebih banyak, penghasilan lebih baik, dan menggandakan pendapatan. Dengan lebih dari 150 unit di seluruh India Selatan, solusi energi bersih ini sedang membentuk kembali mata pencaharian pedesaan.

Penggilingan padi tradisional bertenaga diesel mendominasi desa-desa di seluruh India, tetapi tidak cocok untuk operasi skala kecil. Tingkat pemulihannya rendah, seringkali menghasilkan kurang dari 300 kg beras dari setiap 500 kg padi yang diolah.

Dampaknya sangat parah karena petani kehilangan volume produksi, kualitas gabah menurun, dan keuntungan menurun. Dengan minimnya kendali atas proses ini, banyak yang akhirnya menjual gabah mentah dengan harga murah, mengorbankan pendapatan dan kemandirian.

Memutus siklus ini membutuhkan inovasi yang disesuaikan dengan realitas petani kecil. Di sinilah SEMA Alto (*Solar-powered Efficient Machinery for Agriculture*) berperan. Didirikan pada tahun 2017 di Bengaluru perusahaan ini diciptakan untuk membangun solusi energi bersih dan teknologi pertanian yang menurunkan biaya, mengurangi emisi karbon, dan memberdayakan masyarakat pedesaan untuk mempertahankan nilai lebih dari hasil panen mereka.

Alih-alih merenovasi pabrik penggilingan diesel besar yang tidak pernah cocok untuk desa, SEMA menata ulang proses tersebut sepenuhnya. Hasilnya, penggilingan padi yang terdesentralisasi dan kompatibel dengan tenaga surya: ringkas, modular, terjangkau, dan mudah dirawat . Petani kini dapat mengolah padi mereka secara lokal, sesuai permintaan, alih-alih bergantung pada penggilingan yang jauh dan tidak efisien.

Pendekatan ini mengurangi kerumitan transportasi, mencegah kerugian, dan memangkas biaya operasional. Di saat yang sama, mengintegrasikan energi surya menjadikan solusi ini berkelanjutan dan selaras dengan tujuan energi terbarukan India yang lebih luas.

Rahasia kesuksesan SEMA *Rice Mills* terletak pada desainnya yang dirancang dengan cermat, yang menjaga kualitas gabah sekaligus memaksimalkan hasil panen. Setiap tahapan proses dirancang untuk presisi dan efisiensi, menghasilkan beras yang lebih bersih dan lebih halus dengan kehilangan beras minimal.

Dibangun sepenuhnya dari baja tahan karat *food grade,* sistem ini memenuhi standar kebersihan dan memastikan beras layak untuk disertifikasi dan dijual. Meskipun hanya membutuhkan daya 3,7 hingga 5 kW, penggilingan ini mencapai tingkat pemulihan beras hingga 65 persen dibandingkan 25 hingga 40 persen yang biasanya terlihat pada penggilingan pedesaan konvensional.

Peningkatan efisiensi ini berarti lebih banyak beras bagi petani, lebih sedikit limbah, dan pendapatan yang lebih tinggi dari panen yang sama. Teknologi SEMA juga adaptif. Selain beras, teknologi ini dapat digunakan untuk mengolah milet, jagung, dan gandum, membuka pintu bagi perubahan yang lebih luas dalam perekonomian pedesaan di India. **Sumber : thebetterindia.com**

SALURKAN PUPUK SUBSIDI, PERKUAT GAPOKTAN DAN KDMP



PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian membuka kesempatan bagi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi penyaluran pupuk bersubsidi (titik serah). Kesempatan tersebut bukan hanya peluang, tapi juga tantangan yang juga tak mudah bisa dilakoni kelembagaan petani tersebut.

Untuk mempersiapkan Gapoktan menjadi titik serah pupuk bersubsidi, pemerintah saat ini terus memperkuat posisi Gapoktan sebagai Kelembagaan Ekonomi Petani, termasuk bisa berkolaborasi dengan KDMP. Sejauh mana kesiapan dua kelembagaan tersebut? Tabloid Sinar Tani bekerjasama dengan PT Pupuk Indonesia menggelar webinar Penguatan Titik Serah Pupuk Bersubsidi & Peran Koperasi Desa Merah Putih, pada Rabu (27/8).

Peran Kopdes Merah Putih

Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono mengatakan, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih akan memperkuat sistem distribusi pupuk subsidi yang selama ini menjadi penopang produktivitas pertanian. Dengan kehadiran KDMP di setiap desa, makin mendekatkan petani kepada pupuk.

"Petani bisa mendapatkan akses yang menyeluruh terhadap input pertanian melalui KDMP, mulai dari pupuk subsidi, non subsidi seperti ZA, ZK, Phosgreen, Phonska Plus, pupuk organik, hingga pestisida," katanya. Karena itu, Kementerian Koperasi terus mendorong penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai mitra strategis dalam rantai pasok pupuk bersubsidi, sehingga dapat membantu upaya pengendalian program distribusi pupuk.

Untuk menjadi penyalur pupuk subsidi sebagai Kios Pupuk. KDMP harus memenuhi persyaratan seperti izin usaha perdagangan, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 47763 atau sesuai bidangnya, rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat, serta memiliki gudang penyimpanan yang sesuai standar.

"KDMP juga harus terdaftar sebagai pengecer resmi di distributor lokal, memiliki gudang, dan jaringan distribusi ke petani atau kelompok tani," tambahnya. Hingga 18 Agustus 2025, tercatat 80.605 Kopdes berbadan hukum, namun baru 35.343 unit memiliki akun Microsite, dan hanya 2.921 unit yang aktif memperbaharui data.

Menurutnya, penguatan titik serah pupuk bersubsidi melalui Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat peran koperasi dalam ketahanan pangan nasional. Bahkan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini tidak hanya memperkuat ekosistem pertanian di tingkat desa, tetapi juga menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi desa dan terwujudnya swasembada pangan.

Perkuat Gapoktan

Kementerian Pertanian melakukan beberapa mekanisme agar Gapoktan bisa menjadi titik serah pupuk bersubsidi. Misalnya, mengidentifikasi petani yang potensial menjadi anggota kelompok tani. "Kemudian kita melihat dan mengetahui banyak Poktan juga yang kurang aktif, sehingga perlu revitalisasi. kita mendorong bagaimana penataan Poktan yang tidak aktif tersebut," kata Tedy Dirhamsyah saat masih menjadi Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

Selanjutnya, lanjut Tedy, pemeritah mendorong kelompok petani menjadi gabungan kelompok tani agar posisi tawar lebih kuat dan tinggi dengan stakeholder yang lain. "Jadi bagaimana Poktan dinaikkan dan ditingkatkan kelasnya, baik dari kemampuan, maupun penumbuhan pengembangan unit-unit kegiatan lainnya," katanya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan jejaring dan kemitraan usaha dari Gapoktan tersebut. Namun Tedy mengakui, ada beberapa kendala Gapoktan menjadi titik serah pupuk bersubsidi yakni permodalan belum memadai, keterbatasan gudang, keterbatasan SDM manajerial, persyaratan masih belum lengkap dan ada keraguan terutama banyaknya kios yang berdekatan.

"Kami menemukan dari 45.000 gapoktan yang ada, ternyata persoalan permodalan belum memadai menjadi kendala utama," ujarnya. Karena itu, menurut Tedy, peran penyuluh dalam mendamping Gapoktan menjadi penting. Terutama, menjadikan Gapoktan berfungsi dengan baik dan membantu dalam mengakses fasilitas keuangan.

"Penyuluh juga menjadi pembimbing peningkatan kapasitas SDM Gapoktan dan memberikan edukasi persyaratan dan manfaat Gapoktan sebagai titik serah pupuk," tambahnya.

Data BPPSDMP, saat ini terdapat 290 Gapoktan, 29 Poktan, serta 406 Koperasi yang sudah bergabung sebagai kios/penyalur pupuk bersubsidi. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian telah mengusulkan 452 Gapoktan sebagai titik serah dalam usulan Tahap IV yang tersebar di 17 provinsi. Sedangkan Kementerian Koperasi telah meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih yang juga dapat menjadi titik serah pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yan Januar Akbar, VP Manajemen Saluran Penjualan PT. Pupuk Indonesia mengatakan, dalam tata kelola pupuk bersubsidi dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) No. 6 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, kemudian Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2025.

"Dengan kebijakan baru tersebut penyaluran pupuk subsidi lebih simple," katanya. Jika sebelumnya, lanjut Yan Januar, distribusi pupuk ada dua yakni distributor yang merupakan entitas sendiri dan pengecer. Kini distributor menjadi pelaku usaha distribusi yang menjadi satu bagian dengan Pupuk Indonesia.

Dikatakan, dengan Perpres baru ada empat pelaku usaha yang bisa menyalurkan pupuk subsidi yakni Gapoktan, Pengecer, Pokdakan dan Koperasi, termasuk Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih. "Alokasinya diatur pemerintah, baik Kementan maupun KKP," ujarnya.

Dengan adanya perubahan skema per bulan Juli kemarin, menurut Yan Januar, pihaknya sudah melakukan pendaftaran, kemudian penunjukan SPJP dengan 1.030 Pelaku Usaha Distribusi (PUD) dan 26.459 penerima pada titik serah (PPTS). "Sampai saat ini kami masih terus merekap. Sementara ini ada sekitar 65 koperasi merah putih yang bergaung, sisanya dari 80 ribu masih dalam proses pelatihan proses bisnis pupuk," katanya.

Untuk Pokdakan, Yan Januari berharap tahun depan sudah bisa menjadi penyalur pupuk bersubsidi. Total kebutuhan pupuk subsidi perikanan sekitar 295.686 ton. "Penyaluran pupuk bersubsidi melalui Pokdakan ini merupakan rekomendasi dosis pemupukan sektor perikanan," katanya. **Yul**

Gapoktan dan KDMP, Pilar Baru Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia memasuki babak baru dengan keterlibatan Gapoktan dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai titik serah. Langkah ini tidak hanya menjadi strategi pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga sebagai upaya memperkuat peran kelembagaan petani di tingkat lokal.

Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) secara aktif mendorong penguatan Gapoktan agar mampu menyalurkan pupuk bersubsidi kepada anggota dan pembudidaya pertanian yang membutuhkan.

Tedy Dirhamsyah, saat masih menjadi Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP mengatakan, hasil identifikasi tidak semua Gapoktan siap menjadi titik serah pupuk bersubsidi. Fenomena ini menjadi tantangan utama karena hanya Gapoktan yang siap secara kelembagaan dan finansial yang dapat menjadi titik serah yang efektif.

Ada sejumlah kendala yang harus dihadapi. Dari data BPPSDMP, tercatat terdapat sekitar 45.000 Gapoktan di seluruh Indonesia, tetapi persoalan permodalan masih menjadi kendala utama. Banyak Gapoktan yang belum memiliki modal cukup untuk menyimpan pupuk dalam jumlah besar, sementara penyimpanan yang memadai merupakan salah satu syarat penting agar pupuk dapat tersalurkan dengan baik dan aman.

"Permodalan belum memadai, keterbatasan gudang, keterbatasan SDM manajerial, persyaratan belum lengkap, dan ada keraguan terutama banyak kios yang berdekatan," ujarnya saat webinar Penguatan Titik Serah Pupuk Bersubsidi dan Peran Koperasi Desa Merah Putih yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani di Jakarta, Rabu (28/8).

Keterbatasan SDM manajerial juga menjadi masalah, karena pengelolaan pupuk bersubsidi membutuhkan sistem pencatatan, pelaporan, dan kontrol yang baik agar distribusi tepat sasaran. Untuk itu, peran penyuluh menjadi sangat krusial.

"Penyuluh tidak hanya mendampingi Gapoktan dalam kegiatan sehari-hari, tetapi juga berfungsi sebagai pembimbing dalam mengakses fasilitas keuangan, mengelola logistik, dan membangun kapasitas SDM," tuturnya.

Tedy menekankan penyuluh berperan memberikan edukasi mengenai persyaratan menjadi titik serah pupuk, manfaatnya, serta prosedur operasional agar Gapoktan bisa berfungsi optimal. "Penyuluh menjadi pembimbing dan pendamping yang memastikan Gapoktan mampu menjalankan tugasnya," ujarnya.

Identifikasi Gapoktan

Tedy yang kini menjadi Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, BPPSDMP mengatakan, pengembangan Gapoktan diawali dengan identifikasi petani potensial yang layak menjadi anggota kelompok tani. "Kemudian kita melihat dan mengetahui banyak Poktan yang kurang aktif, sehingga perlu revitalisasi. Kita dorong penataan Poktan yang tidak aktif tersebut agar bisa kembali berfungsi secara optimal," katanya

Langkah revitalisasi ini menjadi penting karena banyak Poktan yang selama ini hanya tercatat secara administratif, tetapi tidak aktif melakukan kegiatan produktif. Dengan pendataan dan penataan kembali, Gapoktan dapat menjadi tulang punggung penyaluran pupuk bersubsidi, sekaligus memperkuat posisi tawar petani di hadapan stakeholder lainnya.

Selain revitalisasi, pemerintah mendorong pengembangan gabungan kelompok tani. Tujuannya agar Gapoktan lebih kuat, baik secara kelembagaan maupun dalam kemampuan finansial, sehingga mampu mengelola distribusi pupuk bersubsidi dengan lebih efisien.

"Jadi bagaimana Poktan dinaikkan dan ditingkatkan kelasnya, baik dari kemampuan, maupun penumbuhan pengembangan unit-unit kegiatan lainnya," tambah Tedy. Dengan demikian, Gapoktan tidak hanya menjadi titik serah pupuk, tetapi juga pusat pengembangan usaha pertanian yang berkelanjutan.

Tak kalah penting, pemerintah juga mendorong pengembangan jejaring dan kemitraan usaha dari Gapoktan. Dengan jaringan yang lebih luas, Gapoktan bisa memperluas akses pembiayaan, memperoleh teknologi pertanian, dan memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta maupun pemerintah.

Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pertanian yang lebih sehat dan berkelanjutan, sehingga petani tidak lagi bekerja sendiri, tetapi dalam jaringan yang solid dan terstruktur.

Pemeritah ungkap Tedy, juga memanfaatkan sistem digital untuk mendukung tata kelola pupuk bersubsidi. Pendataan anggota dan kebutuhan pupuk dilakukan melalui platform digital yang memungkinkan alokasi pupuk lebih tepat sasaran.

Hal ini juga mempermudah monitoring distribusi dan penebusan pupuk, sehingga pemerintah dapat memastikan subsidi benar-benar sampai ke petani yang berhak. Dengan sistem digital, Gapoktan dapat mengelola stok pupuk secara lebih transparan dan efisien.

Selain Gapoktan, keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih menjadi langkah strategis tambahan. Koperasi ini berperan sebagai mitra dalam penyaluran pupuk bersubsidi, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses Gapoktan.

Keterlibatan Kopdes Merah Putih

Dengan dukungan koperasi, distribusi pupuk dapat menjangkau lebih banyak petani dan pembudidaya ikan. Koperasi juga menjadi penguat kelembagaan karena memiliki pengalaman dalam mengelola jaringan usaha dan mengembangkan kapasitas anggotanya.

Data terbaru menunjukkan bahwa saat ini terdapat 290 Gapoktan, 29 Poktan, dan 406 koperasi yang telah bergabung sebagai kios atau penyalur pupuk bersubsidi. Selain itu, BPPSDMP telah mengusulkan 452 Gapoktan sebagai titik serah dalam Tahap IV yang tersebar di 17 provinsi.

Dengan jumlah ini, pemerintah berharap distribusi pupuk bersubsidi menjadi lebih merata dan tepat sasaran. "Keterlibatan Gapoktan dan koperasi bukan hanya soal logistik, tetapi juga membangun fondasi kelembagaan yang kuat untuk pertanian dan perikanan berkelanjutan," tuturnya.

Peran Gapoktan sebagai titik serah memiliki dampak yang lebih luas. Dengan menjadi pusat distribusi pupuk, Gapoktan juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran bagi anggota dan komunitas pertanian di sekitarnya. Begitu juga keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih menghadirkan peluang baru bagi penguatan ekonomi lokal. **Gesh/Yul**

Rekap Data Gapoktan Sebagai **Titik Serah Pupuk Bersubsidi**

No	Gapoktan	Jumlah	Layak	Tidak Layak	Total	Keterangan
1	Usulan Tahap I (142) dan II (214)	356	208	148	356	
2	Koperasi	10	7	3	10	
3	e-Pubers PIHC	288	288		288	
4	Usulan Tahap III	35				Surat No. B-15855/SM.050/I.2/07/2025 tanggal 4 Juni 2025 (belum diverifikasi)
	Usulan Tahao IV	482				Surat No. B-17917/SM.020/I.2/06/2025 tanggal 25 Juni 2025 (belum diverifikasi)
5	Usulan Tahp V	1.166				Surat No. B-19456/SM.020/I.2/07/2025 tanggal 10 Juli 2025 (belum diverifikasi)
	Total	**2.3997**	**503**	**151**	**654**	

Dokumen Persyaratan Pengajuan **Penerima pada Titik Serah (PPTS)**



Penyaluran Pupuk Subsidi Lebih Mudah dan Transparan

Memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 03 Tahun 2025 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025. Regulasi baru tersebut, skema penyaluran pupuk bersubsidi kini lebih sederhana, transparan, dan terintegrasi.

PERSYARATAN JADI PELAKU USAHA DISTRIBUSI (PUD) & PENERIMA PUPUK PADA TITIK SERAH (PPTS)

Persyaratan menjadi Pelaku Usaha Distribusi

- Surat Permohonan menjadi Pelaku Usaha Distribusi (PUD)
- Memiliki Akta Legalitas Perusahaan
- Memiliki NIB dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46652 (Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia)
- Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan ditempat kedudukannya;
- Memilikidan/menguasai Gudang diwilayah kerjanya dengan kapasitas penyimpanan minimal 20 ton (5x10 meter persegi);
- Memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) untuk semua gudang yang diwilayah kerja.
- Memiliki dan/atau menguasai sarana pengangkutan.
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Memiliki Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).
- Surat Pernyataan tentang kesanggupan melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai ketentuan/peraturan pemerintah yang berlaku dan kebijakan Perusahaan.
- Tidak memiliki permasalah keuangan dengan perusahaan dan perbankan yang dibuktikan melalui Surat Pemberitahuan Perusahaan.
- Laporan Keuangan Perusahanaan dan Rekening Koran 3 bulan terakhir.
- Memiliki Permodalan yang cukup sesuaidengan ketentuan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Persyaratan Menjadi Penerima Pupuk pada Titik Serah

- Surat Permohonan menjadi Penerima pada Titik Serah (PPTS)
- Surat Pernyataan Kesanggupan menjadi Penyalur Pupuk Bersubsidi.
- Memiliki Legalitas Badan Usaha (Akta Perusahaan).
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Memiliki NIB dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47763 (Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama).
- Rekening Koran Badan Usaha/Pemilik (3 Bulan Terakhir).
- Memiliki dan/atau menguasai Gudang diwilayah kerjanya dengan kapasitas penyimpanan minimal 5 Ton (5x5 meter persegi).
- MemilikiPermodalan yang cukup sesuai dengan ketentuan PT PI (Persero);
- Persyaratan lain yang ditetapkan PT PI (Persero).

VP Manajemen Saluran Penjualan PT Pupuk Indonesia, Yan Januar Akbar mengatakan, regulasi baru ini memangkas kerumitan aturan lama. Jika dulu ada beberapa skema penyaluran dengan peran distributor dan pengecer yang terpisah, maka sekarang sistemnya lebih ringkas.

"Distributor tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari Pupuk Indonesia sebagai pelaku usaha distribusi," ujarnya saat webinar Tabloid Sinar Tani bekerjasama dengan PT Pupuk Indonesia menggelar webinar Penguatan Titik Serah Pupuk Bersubsidi & Peran Koperasi Desa Merah Putih, Rabu (27/8).

Dalam skema baru tersebut, terdapat empat pihak yang ditunjuk sebagai penerima pupuk pada titik serah, yakni gabungan kelompok tani (gapoktan), pengecer, kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), dan koperasi, termasuk Koperasi Merah Putih. "Empat pelaku usaha ini nantinya akan diatur melalui petunjuk teknis kementerian agar penyaluran pupuk subsidi lebih tepat sasaran," kata Yan.

Dasar hukum perubahan mekanisme distribusi ini diatur dalam Pasal 27 hingga 29 Permentan No. 15 Tahun 2025. Pasal 27 menegaskan BUMN pupuk bertanggung jawab penuh atas penyaluran hingga titik serah. Kemudian Pasal 28 menyebutkan pihak yang berhak menerima pupuk bersubsidi di titik serah, sedangkan Pasal 29 menjelaskan penerima pupuk bersubsidi merupakan badan usaha yang ditunjuk BUMN pupuk melalui Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan pelaku usaha distribusi. "Dengan aturan ini, koperasi dapat ikut menjadi penyalur resmi," tambah Yan.

Sejak Juli 2025, Pupuk Indonesia sudah melakukan pendaftaran, penunjukan, dan penandatanganan SPJB dengan 1.030 pelaku usaha distribusi serta 26.459 penerima pada titik serah (PPTS). Selain itu, 65 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah bergabung, sementara sekitar 80 ribu lainnya masih dalam tahap pelatihan. "Kami ingin memastikan transisi ini berjalan lancar. Angka yang besar ini menunjukkan antusiasme dan kesiapan pelaku usaha di lapangan," ujar Yan.

Salah satu perubahan penting adalah digitalisasi transaksi. Jika sebelumnya penebusan pupuk



dilakukan manual, maka kini semua proses melalui sistem digital. Dengan sistem baru, menurut Yan, penyaluran bisa dipantau secara real time. "Petani tidak lagi menunggu lama, pengecer tidak perlu ribet dengan pencatatan manual, dan kami pun bisa mengawasi langsung transparansi distribusi," katanya.

Perbedaan lainnya adalah aspek legalitas. Bila dulu pengecer hanya diatur Permendag dan umumnya berbadan usaha perseorangan, kata Yan, kini cakupannya lebih luas dan sepenuhnya berada di bawah Permentan. Untuk bisa menjadi penerima pada titik serah, pelaku usaha harus memenuhi sejumlah persyaratan.

"Mereka wajib terdaftar resmi sebagai Koperasi Merah Putih, memiliki atau menguasai gudang dengan kapasitas penyimpanan minimal lima ton, serta memiliki permodalan yang cukup sesuai standar Pupuk Indonesia," tuturnya.

Selain itu, dokumen pendukung seperti surat permohonan, surat pernyataan kesanggupan sebagai penyalur, akta perusahaan, NPWP, KTP, Nomor Induk Berusaha dengan KBLI 47763, hingga rekening koran tiga bulan terakhir juga menjadi syarat utama.

Tiga Tahap

Yan menuturkan, penerima pupuk pada titik serah akan menjalani tiga tahap utama. *Pertama*, proses pendaftaran dan verifikasi hingga penunjukan resmi dan penandatanganan SPJB. *Kedua,* tahap transaksi dan evaluasi di mana pelaku usaha menebus pupuk dan menyalurkannya melalui sistem digital. *Ketiga*, kewajiban menyampaikan laporan penyaluran secara rutin yang juga dilakukan melalui sistem digital. "Kami ingin seluruh proses tercatat jelas dan bisa dievaluasi," tegasnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa tujuan besar dari penyederhanaan skema penyaluran pupuk ini adalah agar petani lebih mudah mendapatkan pupuk berkualitas dengan harga terjangkau. "Intinya kita ingin pupuk, pestisida, dan obat-obatan pertanian tersedia di desa-desa tanpa hambatan. Dengan begitu, produktivitas pertanian bisa meningkat," ucap Yan.

Regulasi baru ini juga menjadi langkah strategis memperkuat ekonomi desa. Melalui kolaborasi antara gapoktan dan koperasi Merah Putih di tingkat desa maupun kelurahan, penyaluran pupuk diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan petani, tetapi juga membuka lapangan kerja baru. "Kami percaya koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional," tambah Yan.

Pupuk Indonesia memastikan semua aspek penunjukan penerima pada titik serah telah memenuhi prinsip legalitas, permodalan, keekonomian, dan literasi. "Kami bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat kapasitas para pelaku usaha," ungkap Yan.

Dengan perubahan skema distribusi pupuk subsidi ini, Yan optimistis akses petani terhadap pupuk akan semakin mudah, transparan, dan tepat sasaran. "Kami ingin petani bisa memperoleh pupuk lebih cepat, lebih dekat, dan dengan cara yang lebih sederhana, " ujarnya. Dengan adanya peraturan baru, Pupuk Indonesia mencoba untuk menguatkan sinergi dengan kementerian dan instansi terkait. **Herman/Yul**

Pupuk Bersubsidi
Jangkau 26 Ribu Pokdakan



Pupuk bersubsidi yang selama bertahun-tahun hanya dinikmati sektor pertanian akhirnya diperluas untuk sektor perikanan. Pupuk bersubsidi kini akan menjangkau 26 ribu Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan) di seluruh Indonesia.

Kabar gembira bagi pembudidaya ikan di seluruh Indonesia. Regulasi terbaru berupa Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2025 membuka jalan bagi pembudidaya ikan untuk kembali mengakses pupuk bersubsidi, yang selama ini menjadi kendala utama dalam meningkatkan produktivitas tambak.

Irma Minarti Harahap, S.Pi, M.Si Ketua Tim Kerja Produksi Direktorat Rumput Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan, pupuk tidak hanya berperan sebagai bahan tambahan. Lebih dari itu, pupuk menjadi nyawa bagi ekosistem tambak.

"Pupuk mendorong pertumbuhan fitoplankton yang menjadi pakan alami bagi ikan dan udang, sekaligus menjaga kualitas air agar tambak tetap seimbang. Dengan pupuk, pertumbuhan ikan menjadi lebih cepat, dan usaha budidaya bisa berjalan lebih optimal," ujarnya saat webinar Penguatan Titik Serah Pupuk Bersubsidi & Peran Koperasi Desa Merah Putih, Rabu (27/8).

Data KKP, luas potensial tambak di Indonesia mencapai hampir 3 juta ha. Namun yang kini dimanfaatkan hanya sekitar 657 ribu ha atau 22 persen. Sebagian besar adalah tambak tradisional dengan produktivitas rendah, sekitar 0,6 ton/ha/tahun.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan. Karena itu, kehadiran pupuk bersubsidi diharapkan menjadi jawaban yang dapat mendorong produktivitas, sekaligus menjaga ekosistem tambak agar tetap sehat dan seimbang.

Prosestata kelola pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan dirancang dengan sistematis. Pemerintah melalui KKP tengah menyusun e-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pembudidaya Ikan atau e-RDKKP, yang meniru mekanisme serupa di sektor pertanian.

Sistem digital ini memungkinkan pendataan kebutuhan pupuk setiap pembudidaya, diverifikasi, dan kemudian alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan sesuai kebutuhan. Dengan mekanisme ini, distribusi pupuk bisa dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan efisien. "Penyaluran pupuk sendiri dilakukan BUMN pupuk yang bertanggung jawab penuh hingga sampai ke titik serah," katanya.

Irma mengungkapkan, persyaratan Pokdakan sebagai titik serah cukup ketat. Setiap Pokdakan harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 47763, bukti kepemilikan atau penguasaan sarana penyaluran, serta kriteria usaha skala mikro dengan permodalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Persyaratan ini dimaksudkan agar hanya Pokdakan yang siap secara kelembagaan dan finansial yang menjadi titik serah, sehingga pupuk bisa tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran," tuturnya.

Selain itu, proses verifikasi dan validasi penebusan pupuk menjadi tahap penting. Pembudidaya ikan dapat menebus pupuk menggunakan KTP di titik serah yang ditentukan. Data penebusan diverifikasi agar sesuai dengan kebutuhan, dan rekonsiliasi dilakukan secara berkala untuk memastikan distribusi berjalan akurat.

Dengan sistem ini, pemerintah berharap pupuk bersubsidi tidak hanya sampai ke tangan pembudidaya, tetapi juga digunakan dengan efektif untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas budidaya.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menekankan pentingnya pembinaan Pokdakan agar benar-benar siap menjadi titik serah. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) melalui penyuluh perikanan melakukan pendampingan mulai dari pendataan kelompok, pembinaan teknis budidaya, hingga pengelolaan keuangan dan kelembagaan.

"Dengan pendampingan ini, Pokdakan tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga mampu mengelola tambak mereka secara profesional dan berkelanjutan," katanya. Namun diakui, tidak semua Pokdakan memiliki kesiapan yang sama, baik dari sisi kelembagaan maupun permodalan. "Koordinasi antar instansi, pengawasan distribusi, dan pendampingan berkelanjutan menjadi kunci agar program ini sukses," tambahnya. **Gsh/Yul**

Salurkan Pupuk Bersubsidi,
KDMP Bentangan Gandeng Gapoktan



Petani Desa Bentangan kini tak lagi pusing mencari pupuk. Melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bentangan, penyaluran pupuk dapat diakses lebih mudah. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu menjawab persoalan klasik petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan desa.

Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, kini memiliki koperasi desa yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi warganya. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bentangan resmi berdiri pada 25 Mei 2025, disahkan melalui akta notaris pada 27 Mei 2025, dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada 3 Juni 2025.

Sekretaris KDMP Bentangan, Hari Wibawa mengatakan, dengan populasi hampir 3.500 jiwa, sekitar 60 persen warga Desa Bentangan berprofesi sebagai petani. KDMP pun menjalin kerja sama dengan dua gabungan kelompok tani (gapoktan), yakni Mulyo Lestari yang beranggotakan 150 petani, serta satu gapoktan lainnya.

"Dalam penyaluran pupuk, koperasi sudah menerapkan sistem digital melalui aplikasi e-Pubers**,** sehingga petani yang telah terdaftar dapat mengambil kuota pupuk secara lebih mudah. KDMP menyalurkan pupuk subsidi maupun nonsubsidi sesuai kebutuhan anggota," tuturnya saat webinar Penguatan Titik Serah Pupuk Bersubsidi & Peran Koperasi Desa Merah Putih, pada Rabu (27/8).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Desa Bentangan memiliki lahan sawah seluas 109,92 hektar (ha), dengan 98 ha diantaranya masih produktif. Dalam satu kali panen, lahan tersebut mampu menghasilkan sekitar 300 ton gabah. Kehadiran koperasi diharapkan mampu memperlancar distribusi pupuk, obat, serta sarana pertanian lainnya sehingga hasil produksi petani semakin maksimal.

Peluncuran resmi koperasi ini digelar pada 31 Juli 2025 dan mendapat kehormatan dikunjungi langsung Presiden RI, Prabowo Subianto. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan harapannya agar koperasi dapat mengoptimalkan potensi desa, khususnya di sektor pertanian, serta mampu meningkatkan kesejahteraan warga.

Hari mengungkapkan, KDMP Bentangan hadir dengan berbagai unit usaha yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Diantaranya, gerai sembako, layanan simpan pinjam, kantor pos dan logistik, gudang pertanian, gerai pupuk serta sarana pertanian, armada truk operasional, hingga apotek dan klinik desa.

"Visi kami adalah mewujudkan kemandirian ekonomi warga Desa Bentangan melalui koperasi berbasis potensi lokal dan teknologi," ujarnya. "Harapan kami, KDMP bisa menjadi pusat distribusi barang-barang bersubsidi, sekaligus wadah untuk memperkuat ekonomi desa melalui pengelolaan potensi pertanian secara modern dan berkelanjutan," tambah Hari Wibawa. **Herman/Yul**

Beras Khusus Beredar, Beras Premium Menipis

Pasar beras terus menggeliat. Setelah beras premium menghilang pasca kasus oplosan beras, kini di pasar beredar beras khusus dengan harga yang jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium. Beberapa perusahaan yang semula banyak memproduksi beras premium kini mengalihkan ke beras khusus.



Hasil pantauan Tabloid Sinar Tani, pemasaran beras khusus tersebut berada di Pasar Modern (Supermarket) dengan harga mencapai Rp 100 ribu lebih setiap kemasan 5 kg. Artinya, harga beras tersebut mencapai Rp 20 ribu/kg. Sementara di pasar eceran atau kios, belum terlihat beredaran beras khusus tersebut.

Dalam kemasan beras khusus tersebut, selain mencantumkan tanda beras khusus, juga tertera beras mengandung zinc dan beberapa vitamin. Ada juga jenis beras pandan wangi dan mentik wangi yang selama ini memang sudah cukup banyak dikenal masyarakat sebagai beras bermutu tinggi.

Di tengah maraknya peredaran beras khusus tersebut, justru beras premium yang selama ini banyak mengisi rak-rak pasar modern keberadaanya mulai menghilang. Hanya ada beberapa merek, seperti Tugu Padi dan Punokawan yang diproduksi Perum Bulog.

Menipisnya beras premium dan banyaknya beras khusus memang membuat konsumen bingung. Pasalnya harga beras khusus tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan harga beras premium.

berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) No. 299 Tahun 2025, pemerintah menetapkan kenaikan HET beras medium dan premium. Dengan aturan ini, HET beras medium dan premium resmi berlaku sejak 22 Agustus 2025.

Dalam ketetapan itu, harga beras dibedakan per zona wilayah. Untuk beras medium, tarif terendah Rp 13.500/kg berlaku di Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Adapun untuk beras premium di wilayah tersebut dipatok Rp 14.900/kg.

HET tertinggi tercatat di Maluku dan Papua, yakni Rp 15.500/kg untuk beras medium dan Rp 15.800/kg untuk beras premium. Wilayah lain berada dikisaran Rp 14.000 - Rp 15.400/kg, baik untuk medium maupun premium.

Selain memuat daftar harga, keputusan Kepala Bapanas juga menjabarkan standar mutu beras. Untuk kategori medium, diantaranya ditetapkan kadar air maksimal 14 persen dan butir patah maksimal 25 persen. Sedangkan untuk premium, persyaratan lebih ketat, seperti butir patah maksimal 15 persen dan bebas dari gabah maupun benda lain.

Terkait temuan harga beras di ritel modern yang menembus Rp 120.000, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan, beras dengan harga setinggi itu bukan beras premium, melainkan beras khusus dengan karakteristik tertentu. Beras khusus mencakup beras hitam, beras merah, beras fortifikasi, biofortifikasi, beras bersertifikat organik, hingga beras dengan indikasi geografis tertentu.

"Itu bukan beras premium. Ada beberapa jenis beras yang mendapat tambahan, seperti fortifikasi atau sertifikasi organik. Jadi kategorinya adalah beras khusus," kata Arief di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (1/9).

Menanggapi banyaknya perusahaan yang mengalihkan produksi dari beras premium ke beras khusus, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, seluruh beras yang disubsidi pemerintah dalam produksinya, baik pupuk, benih dan irigasi, harus mengikuti regulasi pemerintah yakni HET pemerintah.

Pemerintah lanjut Amran, memberikan subsidi sebesar 4.090/kg atau dengan nilai total Rp 150 triliun untuk irigasi, benih, pupuk dan alat mesin pertanian. "Tulis temen-temen wartawan, semua yang disubsidi harus mengikuti regulasi pemerintah. Kecuali perusahaan tersebut menanam di areal sendiri, pakan benih, pupuk dan air yang tidak disubsidi pemerintah," kata Amran usai Gerakan Pangan Murah Serentak Beras SPHP dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Gedung Kementerian, Sabtu (30/8).

Jika ada yang tidak mengikuti aturan, maka pemerintah melalui Satgas Pangan akan bertindak. "Kami berdiri untuk kepentingan rakyat, berpihak pada petani dan konsumen/ Kita membela petani 150 juta jiwa," katanya.

Sementara itu Ketua Satgas Pangan, Brigjen Polri Helfi Assegaf mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan ke PPNS Badan Pangan Nasional yang sudah dilatih untuk melakukan penyidikan. Artinya, secara administratif meraka bisa melakukan penyidikan dan jika terbukti melanggar peraturan Kepala Bapanas akan ditindak, bahkan dicabut ijin usahanya.

Survei BPS Harga Beras

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan harga beras mengalami kenaikan serentak di tingkat penggilingan, grosir, maupun eceran pada Agustus 2025. Kenaikan ini tercatat pada semua jenis beras, baik medium maupun premium.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menyampaikan, rata-rata harga beras di penggilingan naik 1,87% secara bulanan (*month-to-month*/mtm) menjadi Rp13.596/kg atau meningkat 6,15% dibanding periode yang sama tahun lalu (*year-on-year*/yoy).

"Jika dipilah menurut kualitasnya, beras premium naik 2,32% secara mtm atau 5,77% secara yoy. Sedangkan beras medium naik 1,46% secara mtm dan 6,58% secara yoy," ujar Pudji dalam paparan Neraca Perdagangan Agustus 2025, Senin (1/9).

Di tingkat grosir, harga beras Agustus 2025 naik 0,64% secara mtm menjadi Rp14.292 per kilogram, atau naik 5,56% secara yoy. Sementara di tingkat eceran, harga rata-rata mencapai Rp15.393 per kilogram, tumbuh 0,73% mtm dan naik 4,24% yoy. "Sebagai informasi, harga beras yang kami sampaikan merupakan rata-rata yang mencakup berbagai jenis kualitas dan wilayah di Indonesia," tambah Pudji.

Meredam gejolak harga beras, Pemerintah Indonesia terus menggelontorkan beras beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP). Misalnya, saat Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 4.320 titik kecamatan di 38 provinsi yang terpusat di Kantor Kementerian Pertanian pada Sabtu (30/8).

Distribusi juga diperkuat melalui kerja sama lintas sektor, yakni 414 titik distribusi bersama Polri, 449 titik bersama TNI, 129 titik melalui jaringan BUMN, serta 415 titik distribusi lainnya. Beras SPHP yang disalurkan dijual dengan harga Rp60.000 untuk kemasan 5 kilogram.

Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani menganggap, Gerakan Pangan Murah ini sangat strategis untuk memastikan ketersediaan beras dengan harga stabil di seluruh lapisan masyarakat. "GPM menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat," ujar Rizal.

Hingga 30 Agustus 2025, BULOG telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 299,6 Ribu ton dengan melibatkan lebih dari 30 ribu mitra di seluruh Indonesia. Rata-rata realisasi harian berada di kisaran 6.000 ton. Sebagai bagian dari komitmen layanan publik, BULOG menyediakan layanan pengaduan Bella BULOG di nomor 0811 1967 016, sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhan maupun masukan terkait distribusi beras SPHP. **Yul**

Menakar Kebijakan Mutu Beras



Setelah dikejutkan berita tentang beras oplosan dan instabilitas harga beras, pemerintah berencana untuk menetapkan kebijakan hanya satu mutu beras, tidak lagi mengacu ke Standar Nasional Indonesia (SNI). Peran Pabrik Penggilingan Beras (PPB) akan dikerjakan BUMN/BUMD atau PPB swasta harus mendapat izin khusus.

Sejak penerapan HET beras pada akhir 2017, mutu beras terus diturunkan. Pemerintah meninggalkan patokan mutu beras menurut ketentuan SNI 6128/2015, yang disusun searah dengan standar kualitas beras global. Namun, ketentuan mutu beras premium dan medium diubah dan diturunkan melalui ketetapan SNI 6128/2020, disusun sejalan dengan Permentan 31/2017. Demikian juga, mutu Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diturunkan dengan menaikkan butir patah dari 20% menjadi 25%.

Sejauh manakah kebijakan ini berdampak pada arah perubahan preferensi konsumen, dan pada pelemahan industri penggilingan padi (PP)?

Industri Penggilingan Padi

Kualitas beras tidak hanya terkait dengan varietas, lingkungan produksi, tapi juga proses giling. Melalui proses giling, PP dapat menghasilkan beras putih (derajat sosoh tinggi), beras kepala dan beras berukuran panjang (tidak patah). Namun industri PP masih lemah, sulit menurunkan kehilangan hasil dan meningkatkan rendemen giling, tingginya biaya produksi beras berkualitas, serta terhambat upaya peningkatan nilai tambah dari produksi sampingan yang berasal dari gabah/beras. Sementara Pemerintah belum banyak memberi perhatian untuk memecahkan masalah itu, padahal telah berlangsung selama 50 tahun terakhir.

Penelitian pada 2024, memperlihatkan bahwa kehilangan hasil pada perusahaan PPK mencapai 3,6 juta ton GKG per tahun (total kehilangan hasil 4,4 juta ton GKG), senilai Rp 21 triliun (total nilai kehilangan hasil Rp 25 triliun). Sedangkan kehilangan hasil PPB hanya 239 ribu ton GKG dengan nilai Rp 1,4 triliun/tahun. Kehilangan hasil secara tidak langsung telah memboroskan penggunaan air, mineral, lahan, pupuk, pestisida, bahan bakar (BBM), tenaga kerja, serta sebagian subsidi input menjadi sia-sia.

Hal itu tidak lepas dari dominasi PPK dalam industri PP. Sekitar 95% dari 170 ribu unit usaha PP pada 2020 adalah PPK. Menggunakan kriteria total kapasitas giling, pangsa PPK mencapai 83%, PPB hanya 6%. Sisanya 11% adalah penggilingan padi skala sedang (PPS). Dominasi PPK telah membawa sejumlah persoalan yang sulit di atasi. Usaha PPK umumnya hasil investasi tahun 1970-1980-an, dicirikan alat-mesin dan konfigurasi yang tidak lengkap. Hal itu membuat kehilangan hasil pada tahap pengeringan dan penggilingan sulit diturunkan, termasuk meningkatkan rendemen giling dan kualitas beras.

Penyerapan gabah petani dan kualitas beras, banyak kaitannya dengan ketersediaan dryers. Pengusaha PPK mengeringkan gabah di bawah sinar matahari dengan alas tikar, terpal atau semen. Sehingga kehilangan hasil tinggi, serta rendemen giling dan kualitas beras menjadi rendah. PERPADI melaporkan pada 2024, pemilikan sarana pengeringan (dryers sederhana) yang dimiliki PPK di 5 Kabupaten sentra produksi padi di Jawa, hanya 24%. PPK di luar Jawa tentu lebih rendah lagi.

Sebaliknya, pengusaha PPB umumnya mengeringkan gabah dengan dryers dan memiliki silo tempat penyimpanan gabah, yang terintegrasi dengan alat pengering mekanis. PPB sesungguhnya "penyelamat" gabah petani, karena mereka berani menyerap gabah petani pada musim panen raya, yang umumnya berlangsung bersamaan dengan musim hujan.

Saling Membutuhkan

Keberadaan PPB dan PPK tidak saja sebagai kompetitor, tapi juga saling membutuhkan. Mereka kerap "berkonflik" dalam perebutan gabah yang jumlahnya jauh lebih rendah dari total kapasitas giling. Dengan kekuatan modal dan teknologi, PPB unggul, dapat memproduksi beras berkualitas tinggi, serta dapat memanfaatkan *by product* sekam dan bekatul menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.

Di sisi lain, PPK dan PPB juga saling membutuhkan. Banyak beras hasil giling PPK, seperti beras asalan dan beras pecah kulit (PK) ditampung PPB. Dengan mesin yang ada, PPK lebih menguntungkan menjadi produsen utama beras asalan. Beras tersebut ditampung PPB untuk diolah lebih lanjut. Meluasnya pasar beras asalan membuat PPK tidak punya insentif untuk memperbaiki kualitas. PPK terperangkap dengan itu.

Sebagian PPK juga berperan sebagai produsen beras pecah kulit (PK), yang selanjutnya digiling PPB. Pangsa pasar beras PK belum luas, diperkirakan kurang dari 5%. Perluasan pasar beras PK dapat membuat gairah PPK untuk berinvestasi memperbaiki sebagian mesin, terutama *dryers* dan ayakan agar dapat menghasilkan beras bermutu. Tentunya akan memperoleh harga jual beras PK yang layak.

PPB sangat membutuhkan beras PK bermutu, serta dapat memanfaatkan hasil ikutan bermutu untuk pengembangan industri hilir. Dampaknya kehilangan hasil pada tahap pengeringan dan penggilingan berkurang, serta biaya produksi beras berkualitas menjadi rendah. Perebutan gabah dapat menurun, yang berpengaruh positif terhadap stabilisasi harga beras.

Dalam kaitan dengan penetapan mutu beras, perlu dipertimbangkan dua isu yang saling terkait, yaitu kepentingan konsumen dan memperkokoh keberadaan industri PP. Pertama, kepentingan konsumen. Dapat ditempuh dengan mengkaji secara teliti rencana pembatasan dan penurunan kualitas beras, serta mengekang keberadaan PPB. Perubahan preferensi konsumen seharusnya mendapatkan porsi yang layak dalam kebijakan perberasan. Jika beras kualitas bagus tersedia sangat terbatas di pasar dalam negeri, maka akan mendorong berkembangnya *black market,* serta akan marak penyeludupan beras.

Kemudian, pemerintah perlu menerapkan kembali kualitas beras (mengacu ke standar global) sesuai SNI 2015. Pada waktu yang sama, pemerintah perlu membuka akses beras buat rumah tangga berpendapatan rendah dengan ketetapan HET beras kualitas medium, serta program bantuan beras. Sedangkan beras kualitas bagus diserahkan pada mekanisme pasar.



M. Husein Sawit, Anggota Dewan Penasehat PP PERHEPI

Kedua, penguatan industri PP. Pemerintah sudah saatnya mengelola pasar dan meredam konflik dalam perebutan gabah, agar industri PP menjadi lebih kuat. Salah satunya memperluas pangsa pasar beras PK yang dapat berdampak positif terhadap pengurangan kehilangan hasil dan meningkatkan rendemen serta kualitas beras.

Pemerintah juga memfasilitasi kerjasama formal antara PPK dengan PPB. Bahkan sebaiknya berbentuk tertulis/kontrak yang menguraikan hak dan kewajiban masing-masing. Kalau sudah tertulis, maka ada kewajiban dari PPB menerima beras PK sesuai standar. Hal ini dapat membuat PPK tertarik untuk memperbaiki mesin agar dapat memproduksi beras PK bermutu. Dana perbaikan yang diperlukan tentu tidak terlalu besar, sebatas untuk dryers dan ayakan.

BULOG sebagai BUMN sebaiknya mengambil peran dalam memperluas pasar dengan menyerap beras PK. Sentra Penggilingan Padi (SPP) dan Sentra Penggilingan Beras (SPB) BULOG secara bertahap lebih banyak membeli dan mengolah beras PK sehingga diperoleh beras berkualitas dan juga hasil ikutannya. PPK dibina agar mereka mampu menghasilkan beras PK berkualitas, serta membantu mereka dalam perbaikan pencatatan dan pembukuan usaha. **M. Husein Sawit (Anggota Dewan Penasehat PP PERHEPI).**

Herning, Kenalkan Sorgum di Lahan Gambut



Tinggal di wilayah yang mayoritas lahan gambut menjadi tantangan tersendiri untuk bisa Bertani. Ketika sebagian orang menyerah pada lahan gambut yang keras dan miskin hara, Hj. Herning Raharjanti, SP, justru melihat peluang.

Perempuan yang menjabat sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya ini percaya bahwa setiap tanah, sekering dan sesulit apa pun, bisa melahirkan solusi pangan jika disentuh dengan inovasi.

Visi itu ia wujudkan melalui pengembangan tanaman sorgum, pangan alternatif yang kini mulai disebut sebagai "beras masa depan" bagi warga Palangka Raya. Di balik perjalanan sorgum yang perlahan mendapat tempat di hati masyarakat, ada tekad Herning yang kuat untuk menjawab tantangan ketahanan pangan di daerahnya.

Palangka Raya memiliki wilayah yang luas, lebih dari 2.600 km persegi. Namun, mayoritas tanahnya berupa gambut dan pasir. Jenis tanah ini dikenal tidak subur, memiliki keasaman tinggi, dan membutuhkan biaya besar jika ingin dijadikan lahan sawah. Tak heran, hingga kini luas sawah di kota ini hanya sekitar 5 ha, dengan hasil produksi yang masih rendah.

"Untuk mengolah lahan gambut jadi sawah padi itu butuh alat berat, pupuk dalam jumlah banyak, dan waktu yang panjang. Petani kita tentu berat menanggungnya. Inilah alasan kenapa Palangka Raya masih bergantung pada beras dari daerah lain," ungkap Herning.

Alih-alih larut dalam keterbatasan, Herning memilih mencari alternatif. Menurutnya, pangan bukan hanya soal beras. "Ubi, jagung, hingga keladi sudah dicoba meski penerimaan masyarakat masih rendah," ujarnya.

Namun ketika ia mengenal sorgum, keyakinannya muncul. Tanaman ini bukan hanya mudah beradaptasi dengan lahan marginal, tetapi juga kaya nutrisi, sehat, dan rasanya mirip nasi.

Pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya sorgum memang dihadapkan pada permasalahan. Misalnya, pH rendah, senyawa-senyawa beracun bagi tanaman, defisiensi unsur hara, pencucian hara tinggi dan kejenuhan basa rendah serta penghambatan serapan unsur hara.

Karena itu, perlu pengelolaan lahan tepat dan tanaman yang sesuai untuk mendapatkan hasil produksi tanaman yang optimum. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut dengan mengembangkan jenis varietas sorgum yang dapat di budidayan dilahan gambut.

Hadirkan Sorgum di Meja Makan

Dua tahun lalu, Herning bersama tim memulai langkah berani, yaitu dengan menanam sorgum di lahan percontohan (demplot) di kawasan Taman Teknologi Pertanian (TPP) Banturung, Kecamatan Bukit Batu. Hasilnya mengejutkan. Sorgum tumbuh subur, tidak banyak membutuhkan pupuk, dan panennya sangat menjanjikan.

Tidak berhenti di lahan percobaan, Herning memastikan sorgum bisa hadir di meja makan warga. Bersama Dinas Pertanian, ia mulai mengolah sorgum menjadi beras dan tepung. Produk tersebut diperkenalkan melalui program pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman) dan bahkan dijadikan bingkisan resmi pada peringatan HUT ke-68 Kota Palangka Raya serta HUT RI ke-80.

"Respon masyarakat cukup positif. Banyak yang penasaran karena rasanya hampir sama dengan nasi, tapi lebih sehat. Tepungnya juga bisa menggantikan terigu untuk kue dan olahan lainnya," tutur Herning.

Meski awalnya sempat diragukan, perlahan sorgum mulai diterima. Para petani pun menunjukkan dukungan karena melihat pertumbuhannya yang bagus di tanah Palangka Raya. Pada 2024, satu kelompok tani sudah resmi mengembangkan tanaman ini.

Satu harapan Herning. Ke depan ia berharap lebih banyak petani bergabung, apalagi kini sudah ada kerja sama pemasaran dengan Koperasi Sorgum Indonesia di Bandung.

Namun perjuangan ini belum usai. Sorgum masih menghadapi tantangan, mulai dari serangan hama burung hingga perlunya sosialisasi lebih luas agar masyarakat terbiasa mengonsumsinya. "Setiap pangan baru pasti butuh waktu untuk diterima. Tapi kami yakin, dengan edukasi dan contoh nyata, masyarakat akan beralih," ujarnya.

Jaga Masa Depan Pangan

Bagi Herning, mengembangkan sorgum bukan hanya soal menyediakan alternatif pangan, tetapi juga tentang menjaga masa depan Palangka Raya. Dengan mengurangi ketergantungan pada beras, kota ini akan lebih siap menghadapi isu krisis pangan global.

Ia pun aktif menggandeng berbagai pihak, termasuk PKK Kota Palangka Raya, untuk melakukan sosialisasi di berbagai kegiatan. Dari pasar rakyat hingga acara resmi, sorgum diperkenalkan sebagai pangan sehat dan bergizi.

"Target kami sederhana tapi penting: menjadikan sorgum sebagai bagian dari keseharian masyarakat. Kalau masyarakat sudah bisa menerima, maka ketahanan pangan kita lebih kuat," jelasnya.

Kini, beras dan tepung sorgum sudah mulai dicari masyarakat. Walau produksinya masih terbatas, sudah ada berbagai olahan berbahan sorgum yang diperkenalkan di acara-acara kota, mulai dari nasi, bubur, hingga kue.

Herning menutup visinya dengan optimisme, sorgum ini bukan sekadar makanan. Ini adalah super food masa depan. Mari kita belajar makan bukan hanya sekadar kenyang, tapi juga sehat. "Ya Enak, ya Sehat, Ya Kenyang, Ya Sorgum Super Food Masa Depan" ungkapnya. **Herman/Yul**



Daun Dewa,
Potensial jadi Dewa Herbal



Daun dewa memiliki potensi sangat besar untuk menjadi komoditas herbal unggulan Indonesia. Sebagai tanaman asli Indonesia dan Asia Tenggara, daun dewa sudah adaptif dengan lingkungan tropis, sehingga budi dayanya lebih mudah dibanding tanaman herbal introduksi dari luar negeri.

"Kalau tanaman itu berasal dari daerah tersebut, berarti dia sudah cocok untuk tempat itu. Untuk tanaman obat, ini sangat menguntungkan," ujar Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Prof Sandra Arifin Aziz seperti dikutip dari laman IPB University.

Ia menjelaskan, daun dewa dikenal memiliki berbagai manfaat. Diantaranya antikanker, antiradang, penurun tekanan darah, pengendali gula darah, pengobatan stroke, dan penyembuhan luka.

Di Tiongkok Selatan, tanaman ini dikenal dengan nama *Samchit* dan dikonsumsi dengan aturan tradisional. Misalnya, tiga lembar selama tujuh hari atau tujuh lembar selama tiga hari untuk meredakan batuk.

Meski memiliki khasiat yang dipercaya secara turun-temurun, Prof Sandra menekankan bahwa pengolahan tanaman herbal harus tepat agar kandungan bahan aktifnya terjaga. "Yang terbaik selalu segar, langsung dikunyah. Kalau tidak memungkinkan, bisa dikukus, direbus, atau dikeringkan. Namun sayuran dan buah segar tetap lebih baik dibanding yang sudah diproses," katanya saat ditanya cara terbaik untuk mengonsumsi daun dewa.

Ia juga mengungkap bahwa produksi dalam skala industri memerlukan penanaman dalam jumlah besar, terutama jika dilakukan ekstraksi untuk menghasilkan produk herbal siap konsumsi seperti teh atau kapsul. Dalam proses itu, dibutuhkan tanaman dengan kadar bahan aktif lebih tinggi.

Hingga kini, penelitian daun dewa di IPB University baru sampai tahap budidaya dan analisis kandungan bioaktif seperti total flavonoid, alkaloid, dan terpenoid. Formulasi fitofarmaka atau obat herbal terstandar dari daun dewa belum sampai tahap uji klinis. "Kalau budidayanya, saya sudah kerjakan sejak lebih dari sepuluh tahun lalu. Tapi untuk formulasi obat, itu biasanya dikerjakan di Pusat Studi Biofarmaka Tropika," ujar Prof Sandra.

Menurutnya, teknik budidaya daun dewa relatif sederhana. Tanaman tahunan ini dapat diperbanyak dengan stek batang atau umbi, dan mulai dapat dipanen setelah berumur enam bulan. "Potong saja batangnya, pastikan ada buku batang yang masuk tanah. Dari situ tunas baru akan tumbuh," ujarnya.

Meski riset ilmiah terhadap daun dewa masih terus berlanjut, Prof Sandra optimis tanaman ini memiliki masa depan cerah dalam pengembangan herbal Indonesia. "Kita sudah tahu khasiatnya dari zaman dulu. Tinggal bagaimana kita membudidayakan, menstandarkan, dan mengolahnya menjadi produk yang aman dan teruji," ucapnya. **Yul**

Cara Mengonsumsi **Daun Dewa**

Untuk mendapatkan manfaat daun dewa, kita bisa mengolahnya menjadi teh. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, pilih beberapa lembar daun dewa segar, lalu cuci bersih hingga tidak ada kotoran yang menempel. Kedua, tebus daun dewa ke dalam panci selama 10–15 menit hingga air berubah warna dan aroma khas daun dewa terasa. Ketiga, setelah direbus, saring air rebusan daun dewa dan tuang ke dalam cangkir. Kita juga bisa menambahkan madu atau perasan lemon sesuai selera.

Konsumsi teh daun dewa sebaiknya tidak berlebihan, cukup 1–2 kali sehari. Hal ini karena konsumsi daun dewa tidak selalu cocok untuk semua orang. Beberapa efek samping yang mungkin terjadi antara lain reaksi alergi, gangguan pencernaan atau interaksi dengan obat-obatan tertentu. **Alodokter/Yul**

Info Puslatan

Brigade Pangan Lajonga
Produksi Meningkat, Omset pun Terdongkrak



Brigade Pangan Lajonga di Sulawesi Selatan menjadi satu contoh keberhasilan anak muda terjun ke dunia pertanian. Dengan teknologi, mereka bukan hanya mampu meningkatkan produktivitas tanaman padi, tapi omset pun terdongkrak.

Hamparan sawah di Lurahan Lajonga, Kecepatan Pancalautang, Kabupaten Sidenrampang kini terlihat lebih hidup. Tidak hanya hijau, tetapi juga penuh optimisme. Para petani muda yang tergabung dalam Brigade Pangan Lajonga berhasil membuktikan bahwa pertanian modern bisa meningkatkan produktivitas secara signifikan.

Hasilnya? Panen padi hingga 5,6 ton/ha naik dari sebelumnya hanya 3–4 ton/ha. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan pemerintah. "Awalnya kami belajar menanam padi secara tradisional, kemudian mulai mencoba alat-alat pertanian canggih," kata Husni, manajer Brigade Pangan Lajonga dengan bangga menceritakan perjalanan kelompoknya..

Brigade ini mengelola lahan seluas 218 ha dan memiliki satu combine harvester, satu traktor roda empat dan dua traktor roda dua. Fasilitas tersebut diperoleh langsung dari Kementerian Pertanian dan Presiden. Alat-alat modern ini membantu percepatan pengolahan lahan dan panen, terutama di musim hujan, sehingga padi tidak terendam banjir dan produktivitas tetap terjaga.

"Dampak paling signifikan adalah percepatan pengolahan lahan di TR4. Dari sebelumnya IP100, kini bisa naik menjadi IP200. Dengan kombin harvester, panen lebih cepat dan efisien," jelas Husni.

Omset petani pun meningkat, mencapai sekitar Rp 30 juta/panen. Hasil ini menunjukkan bahwa teknologi modern, bila diterapkan dengan tepat, mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Selain produktivitas, Brigade Pangan Lajonga juga fokus pada pengembangan petani muda. "Kami ingin generasi muda mengenal alat-alat pertanian canggih dan berperan aktif dalam pertanian modern. Anak-anak muda ini sekarang menjadi petani milenial yang siap menghadapi tantangan pertanian ke depan," kata Husni.

Brigade Pangan Lajonga bukan hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga membangun kolaborasi dan kapasitas kelembagaan. Petani belajar mengelola stok, merencanakan tanam, hingga mengatur panen dengan sistem yang lebih profesional. Pendampingan dari pemerintah, mulai dari Kementerian Pertanian hingga BUMN terkait, memastikan setiap tahap proses pertanian dijalankan dengan baik.

Husni juga menekankan pentingnya jejaring dan kemitraan. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, petani, dan pihak swasta, distribusi alat pertanian dan pendampingan bisa berjalan lebih efektif. Keberhasilan Brigade Pangan Lajonga menjadi bukti nyata bahwa pertanian tidak lagi harus tradisional dan monoton.

Dengan semangat inovasi, pemuda desa kini mampu mengubah cara bercocok tanam menjadi lebih efisien dan produktif. Peningkatan hasil panen yang signifikan pun menjadi motivasi bagi petani lain untuk mengadopsi metode serupa.

Kisah sukses ini membuktikan kombinasi teknologi modern, semangat petani muda, dan dukungan pemerintah mampu mengubah wajah pertanian desa. Brigade Pangan Lajonga menjadi contoh nyata bahwa pertanian produktif dan modern bukan sekadar impian, tetapi bisa diwujudkan dengan kerja keras, inovasi, dan kolaborasi. **Puslatan BPPSDMP**

Koperasi: Mesin Waktu yang Berpikir untuk Indonesia ke-80 Tahun Merdeka

Oleh : **Agus Pakpahan,**
Rektor Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin University)

Di Norwegia, koperasi bukan nostalgia, tetapi algoritma sosial yang terus diperbarui. Di Finlandia, operasi adalah sekolah demokrasi, tempat anak-anak belajar memilih, bukan hanya produk, tetapi masa depan. Di Jepang, koperasi adalah disiplin yang lembut, yang mengatur pasar dengan etika, bukan dengan dominasi.

Di Korea Selatan, koperasi adalah simfoni komunitas, yang menyanyikan efisiensi tanpa kehilangan empati. Di Amerika, koperasi adalah eksperimen rasional, tempat Thomas Schelling tersenyum melihat bagaimana pilihan individu bisa membentuk solidaritas kolektif tanpa paksaan, tanpa propaganda. Marvin Harris berkata, "Manusia makan bukan hanya karena lapar, tetapi karena sistem budaya yang mengatur kelangkaan." Dan koperasi menjawab, "Kami mengatur kelangkaan dengan kebersamaan, bukan dengan kompetisi yang membakar ladang."

Multatuli berteriak dari masa lalu, "Beranilah menjadi adil!" Dan koperasi menjawab, "Kami tidak menjual keadilan, kami membaginya: dalam rapat, dalam harga, dalam keputusan yang dibuat bersama." Koperasi bukan hanya sistem ekonomi, ia adalah mesin waktu yang berpikir. Ia mengingat masa lalu yang tertindas dan merancang masa depan yang setara.

Ia tidak dibangun dari utopia, tetapi dari kalkulasi yang penuh kasih. Ia tidak hanya tumbuh dari ideologi, tetapi dari kebutuhan yang dipahami bersama. Di Indonesia, koperasi belum menjadi arsitek masa depan, karena kita masih memandangnya sebagai warisan usang, bukan sebagai inovasi.

Padahal ia bisa menjadi laboratorium kebangsaan, tempat kita belajar menjadi warga yang melangkah bersama menuju cita-cita masa depan milik semua. Jika kita ingin bangkit, jangan hanya bicara tentang pertumbuhan. Bicaralah tentang kepemilikan bersama. Tentang harta yang dimiliki bersama.

Tentang keputusan yang tidak dibuat oleh segelintir, tetapi oleh semua yang terdampak. Karena koperasi bukan hanya alat, ia adalah cermin: yang menunjukkan siapa kita dan siapa yang kita ingin jadi.

Penutup:
Kemerdekaan yang Kedua

Kini, delapan puluh tahun sudah Indonesia berdiri sebagai bangsa merdeka. Namun, kemerdekaan bukan hanya soal bendera, ia adalah soal siapa yang memiliki tanah, siapa yang menentukan harga, siapa yang berhak berkata, *"Ini milik kita bersama."* Koperasi adalah kemerdekaan yang kedua—bukan dari penjajah asing, tetapi dari sistem yang memisahkan rakyat dari sumber dayanya. Ia adalah cara kita berkata, *"Tak perlu menunggu investor asing, kami punya sekam, punya rempah, punya akal, punya solidaritas."*

Di usia 80 tahun republik, biarlah koperasi menjadi bendera kedua: bendera yang tidak hanya dikibarkan, tetapi dibagikan. Bendera yang tidak hanya simbol, tetapi sistem. Karena kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi bebas untuk membangun dengan cara yang adil, ilmiah, dan penuh kasih. Dan jika anak-anak kita kelak bertanya, *"Bagaimana kita bertahan di tengah dunia yang berubah?"* Kita akan menjawab, *"Dengan koperasi. Dengan keberanian untuk berbagi. Dengan ilmu yang berpihak. Dengan cinta yang terorganisir."*



Saat Petani Harus Pegang Kendali Pupuk Subsidi

Kolom



Oleh: **Memed Gunawan**

Pupuk subsidi bukan sekadar kantong berisi granula atau butiran. Ia adalah nyawa sawah, penentu panen, dan sering kali penentu nasib petani kecil. Ironisnya, distribusi pupuk subsidi selama ini kerap mendapat keluhan petani, karena terlambat sampai ke mereka.

Keluhan tersebut kemudian membuat pemerintah turun tangan memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi. Salah satunya dalam mekanisme distribusi dengan memangkas jalur. Jika sebelumnya harus melalui berbagai tahapan lini 1 (produsen), kemudian distributor (lini 2), agen (lini 3) dan pengecer/kios (lini 4), maka kini distribusi dari produsen langsung ke titilk serah yakni gapoktan atau pengecer/kios.

Sebagai titik serah pupuk subsidi, peran Gapoktan menjadi kritis. Gapoktan bukan sekadar organisasi formal atau sekadar tempat berkumpul petani, tapi bisa menjadi titik serah pupuk subsidi yang nyata, tempat petani memegang kendali penuh atas apa yang mereka butuhkan.

Jika pupuk diserahkan langsung ke Gapoktan, bukan melalui rantai panjang yang rawan kebocoran, transparansi meningkat, keadilan terasa. Paling penting adalah pupuk subsidi bisa tepat sasaran dan penerima yakni petani.

Tapi kendali ini tidak otomatis. Di lapangan tidak semua Gapoktan siap menjadi titik serah pupuk subsidi. Untuk itulah Gapoktan perlu penguatan. Administrasi harus rapi, pencatatan akurat, pengurus bertanggung jawab.

Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang baru diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Klaten, beberapa waktu lalu, bisa menjadi penguat. Bukan hanya payung kelembagaan, KDMP juga sebagai jaminan bahwa distribusi pupuk berlangsung tertib, bebas spekulan, dan tepat sasaran. Gapoktan memasak, Kopdes MP menutup atapnya agar semua tetap aman.

Bayangkan dampaknya: petani tidak lagi sekadar penerima subsidi, tapi pengelola. Mereka belajar manajemen, transparansi, dan solidaritas. Mereka bisa menata benih, saprotan, bahkan menyiapkan akses pasar dengan sistem yang jelas. Distribusi pupuk hanyalah awal dari kedaulatan pertanian yang sesungguhnya.

Kritik mungkin datang: mungkinkah Gapoktan memikul tanggung jawab besar ini? Jawabannya, bisa, asal ada pendampingan. Pemerintah harus hadir bukan sekadar menunjuk, tapi membimbing. Pelatihan, pengawasan, hingga digitalisasi pencatatan bisa memastikan pupuk sampai ke tangan yang benar.

Gapoktan harus dipersiapkan agar tidak salah langkah. Apalagi bisnis sebagai penyalur pupuk subsidi bukan persoalan mudah. Salah salah bisa masuk kerangkeng.

Jika berhasil, maka petani tidak lagi menjadi penonton di ladangnya sendiri. Mereka menjadi pengelola rantai pangan yang berdaulat. Petani memegang kendali, Kopdes MP menjaga sistem, dan pupuk subsidi menjadi alat untuk memberdayakan, bukan sekadar "dibagikan".



Irsal Las

TEKNOLOGI, Kunci Sukses Bertani di Lahan Rawa

Lahan rawa sebagai lahan sub-optimal kerap dicap sebagai lahan penuh masalah. Namun dibalik itu semua justru mempunyai potensi sebagai lumbung pangan. Kuncinya adalah penerapan teknologi budidaya yang baik dan benar.



Tidak jarang terbesit, seakan-akan rawa dianggap hanya cocok untuk semak atau rumput liar. Padahal, di balik segala keterbatasannya, sebenarnya rawa menyimpan potensi luar biasa. Data menunjukkan, luas rawa di Indonesia lebih dari 32 juta hektar (ha). Dari jumlah itu, sekitar 12 juta ha sangat potensial dijadikan sawah.

Sayangnya, kontribusi lahan rawa terhadap produksi pangan nasional selama ini baru sekitar 13 persen. Padahal, jika produktivitas padi rawa yang kini rata-rata masih di bawah 3 ton/ha bisa ditingkatkan menjadi 4–6 ton tambahan produksi nasional akan sangat besar. Beberapa varietas unggul bahkan mampu menghasilkan lebih dari 7 ton/ha.

Dengan kata lain, rawa adalah penopang baru produksi padi nasional yang selama ini belum digarap optimal. Apa pun strateginya, kunci keberhasilan adalah pada sistem pengelolaan lahan dan air, penerapan teknologi budidaya tepat guna, manajemen usahatani modern, serta dukungan mekanisasi, digitalisasi, dan pemasaran.

Dengan perencanaan yang baik, rawa bisa disulap menjadi sawah intensif dan atau sawah baru. Tentunya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, terutama menyangkut rawa gambut, yaitu dengan menerapkan berbagai teknologi tepat guna, unggulan atau modern.

Tata Air dan Penataan Lahan

Pengelolaan air adalah jantung pertanian rawa. Tanpa tata air yang baik, padi di rawa mustahil tumbuh optimal. Saluran primer dan sekunder, tanggul, pintu air, dan sistem drainase harus dirancang sesuai tipologi lahan, apakah lebak dangkal, lebak dalam, atau pasang surut tipe A, B, C, maupun D.

Pengelolaan tata air di lahan rawa mempunyai beberapa tujuan dan manfaat. Diantaranya, meng-optimalkan penggunaan air untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan kesuburan tanah. Kemudian, mengurangi risiko banjir dan genangan air di lahan rawa, meningkatkan kualitas (fisika dan kimia) air di lahan rawa. Selain itu, mendukung sistem transportasi dalam kawasan lahan rawa.

Selain pengelolaan dalam sistem mikro (petakan sawah) air harus dikelola berbasis sistem yakni "Kawasan Terpadu" dengan luasan tertentu, sesuai dengan sistem hidrologi alaminya. Terpadu, tidak hanya dalam pengelolaan atau pengendaklain aliran air dan tinggi muka air, tetapi juga terkait pola tanam.

Dulu petani hanya mengandalkan alam. Jika pasang besar datang, sawah kebanjiran. Jika kemarau tiba, tanah mengering dan retak. Kini, teknologi tata air digital mulai masuk. Sensor dan Internet of Things (IoT) memungkinkan tinggi muka air dipantau secara *real-time,* sehingga banjir dan kekeringan lebih mudah diantisipasi.

Selain tata air, penataan lahan juga penting. Petak sawah rawa bisa dibuat dengan sistem sawah biasa, surjan (kombinasi sawah dan gundukan untuk palawija), atau tukungan. Penataan ini menentukan jenis tanaman, pengelolaan hara, hingga pola tanam, tetapi ketiganya cocok untuk padi. Penataan lahan rawa untuk memudahkan penataan tanaman, air dan kesuburan tanah, serta menentukan jenis dan pola usahatani dan tanaman.

Penataan lahan dengan sistem sawah dianjurkan pada lahan dengan tipe luapan A atau dekat dengan muara sungai. Lahan tipe itu pasang besar (pasang tunggal) maupun pasang kecil (pasang ganda) terasa hingga petak pertanaman atau pada lahan dengan kedalaman pirit dangkal di bawah 50 cm.

Penataan lahan dengan sistem sawah surjan dianjurkan pada lahan tipe luapan A, B, dan C yang memiliki kedalaman pirit lebih dari 60 cm. Surjan dibuat dengan cara meninggikan sebagian lahan dengan menggali atau mengeruk tanah di sekitarnya.

Pemupukan dan Varietas Unggul

Karena tanah rawa umumnya miskin hara dan bersifat asam, diperlukan pemupukan presisi. Perangkat Uji Tanah Rawa (PUTR) membantu menentukan kebutuhan pupuk spesifik lokasi, sedangkan Bagan Warna Daun (BWD) untuk mengetahui kebutuhan nitrogen.

Pupuk kimia tetap dibutuhkan, tapi harus disertai bahan organik, biochar, kompos, atau kapur untuk menetralkan tanah. Ameliorasi tanah, yakni pemberian bahan tertentu untuk mengurangi racun Fe dan Al, menjadi langkah penting.

Anjuran umum pemupukan di lahan rawa berdasar status hara tanah dan DSS Rawa. Waktu pemupukan diaplikasikan dengan memberikan semua NPK pada umur 0-10 HST, 50% pupuk urea pada umur 24-27 HST. Sisanya diaplikasikan pada 43-47 HST, tergantung pada petunjuk BWD. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik dapat dilakukan dengan pemberian pupuk hayati, seperti Agrimeth, Biotara, dan lain-lainnya.

Varietas unggul menjadi senjata berikutnya. Kementerian Pertanian telah melepas varietas Inpara (Inbrida Padi Rawa) yang dirancang khusus untuk rawa. Inpara 4 dan 5 tahan rendaman 14 hari, Inpara 6 toleran terhadap keracunan besi, sementara Inpara 8 dan 9 berpotensi hasil tinggi.

Petani yang menggunakan varietas ini terbukti lebih berhasil dibanding yang menanam varietas sawah biasa seperti Ciherang varietas Tapus dan lain-lain, walaupun kadang kala produktivitasnya lebih tinggi.

Pengendalian OPT dan Pertanian Modern

Di rawa, serangan hama dan penyakit sulit dihindari. Karena itu, diterapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Strategi ini menggabungkan penggunaan varietas tahan, sanitasi lingkungan, musuh alami, serta pengelolaan air yang baik. Pestisida kimia hanya dipakai sebagai langkah terakhir. Dengan PHT, lingkungan lebih terjaga, biaya produksi lebih ringan, dan hasil panen lebih terjamin.

Agar lebih efisien, mekanisasi pertanian harus menjadi bagian dari usahatani rawa, bahkan menjadi titik ungkit (*entry point*) pengembangan petanian padi modern di lahan rawa. Beberapa contoh penggunaan alsintan seperti traktor tangan, *rice transplanter, combine harvester*, dan mesin pengolahan tanah terbukti menekan biaya produksi hingga 30–40 persen dan menghemat tenaga kerja sampai 80 persen.

Di masa depan, mekanisasi ini akan dikombinasikan dengan pertanian presisi. Penggunaan sensor, drone, hingga Sistem Informasi Geografis (SIG) yang memungkinkan pemetaan detail kondisi lahan. Dengan cara ini, intervensi bisa tepat sasaran dan hasil lebih optimal.

Kisah nyata di lapangan menunjukkan rawa bisa benar-benar menjadi lahan harapan. Di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, hasil panen padi rawa selama ini hanya 2–3 ton/ha. Namun menggunakan varietas unggul dan menerapkan pengelolaan tata air yang lebih baik, hasil melonjak hingga 5 ton/ha.

Kisah serupa juga ditemukan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan. Karena itu, Pemerintah menempatkan rawa sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional.

Irsal Las ***(Agroklimatologist & Kebijakan SDLP/ Ketua Umum Aliansi Peneliti Pertanian Indonesia)***

Kenali Jenis Gula, **Yuk Cegah Diabetes!**

Konsumsi gula secara berlebihan, sering kali tanpa disadari, menjadi salah satu pemicu utama obesitas dan diabetes. Dr Puspo Edi Giriwono, dosen Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) IPB University, menjelaskan jenis-jenis gula berdasarkan strukturnya serta memberikan tips konsumsi gula secara bijak.



Dalam tayangan IPB Pedia di YouTube IPB TV, Dr Puspo menjelaskan bahwa gula memiliki tingkatan struktur berdasarkan kompleksitasnya. Paling sederhana yang dikenal adalah monosakarida. Monosakarida merupakan unit gula dasar yang paling sederhana. Contohnya glukosa dan fruktosa.

Menurut Dr Puspo, glukosa dan fruktosa memiliki sumber dan karakteristik penyerapan yang berbeda dalam tubuh. "Glukosa dapat kita temui di nasi dan kentang, sedangkan fruktosa biasanya dapat kita temui di buah-buahan dan sayuran," paparnya.

Kepala South- East Asia Food and Agricultural Science and Technology (SEAFAST) IPB University ini menambahkan, glukosa lebih mudah diserap, sehingga akan cepat sekali meningkatkan gula darah, bahkan lebih cepat daripada fruktosa.

Meski fruktosa memiliki rasa lebih manis, indeks glikemiknya justru lebih rendah dibandingkan glukosa. "Fruktosa sedikit lebih lambat penyerapannya, termasuk yang kita sebut indeks glikemiknya rendah," kata Dr Puspo. Tubuh juga dapat menghasilkan glukosa dari cadangan lemak ketika dibutuhkan.

Selanjutnya, gabungan dua unit monosakarida akan membentuk disakarida. Contohnya sukrosa, atau gula pasir yang selama ini masyarakat kenal. Sukrosa terdiri dari satu unit glukosa dan satu unit fruktosa. Sementara rantai gula yang lebih panjang akan membentuk oligosakarida hingga polisakarida, seperti pati.

Ia menekankan, kebutuhan gula setiap orang bisa berbeda-beda, tergantung pada jumlah energi yang diperlukan. Untuk konsumsi sukrosa atau gula pasir, ia menyarankan, dua atau tiga sendok teh sehari itu sudah cukup.

Dr Puspo memberikan beberapa tips untuk konsumsi gula yang bijak. Pertama, kurangi gula pasir. Batasi penambahan sukrosa dalam makanan dan minuman. Kedua, tingkatkan aktivitas fisik. Bakar kalori yang dikonsumsi agar tidak menumpuk. Lalu, pilih gula kompleks alami. Konsumsi lebih banyak buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian utuh (*whole grains*).

"Kita dianjurkan mengonsumsi buah lebih banyak, karena selain rasa manisnya, juga mengandung sekian banyak vitamin dan serat pangan. Itu membantu menjaga kesehatan kita," tuturnya.

Dr. Puspo mengingatkan, konsumsi gula berlebihan tentu tidak baik untuk kesehatan tubuh. "Mari kita kurangi jumlah gula yang kita konsumsi, agar kita dapat meminimalkan risiko obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus," ajaknya.

Konsumsi Gula pada Anak

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, Prof Hardinsyah juga mengingatkan, konsumsi gula berlebih pada anak dan remaja di Indonesia harus menjadi perhatian serius. Selama ini pola konsumsi manis saat ini cenderung meningkat, terutama di daerah perkotaan.

"Di kota, makanan manis semakin mudah dijumpai, baik tradisional maupun modern. Ditambah banyak orang tua bekerja sehingga anak lebih bergantung pada pangan di luar rumah," ujar Prof Hardinsyah seperti dikutip dalam laman IPB University.

Menurutnya, anak-anak sering kali mengonsumsi gula tidak hanya dari minuman manis atau bekal, tetapi juga dari makanan sehari-hari dan jajanan sekolah. Bahkan, gula tersembunyi terdapat dalam kecap, saus, sambal, maupun berbagai kudapan seperti wajit, apem, donat, dan kue manis lainnya.

Prof Hardinsyah menekankan, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan Kementerian Kesehatan tidak boleh melebihi 50 gram atau setara 4–5 sendok makan per hari untuk orang dewasa. "Kalau anak sekolah tentu lebih rendah, sekitar 3–4 sendok makan. Jika berlebihan, risiko obesitas dan diabetes meningkat," katanya.

Ia menjelaskan, konsumsi gula berlebih bisa mengakibatkan kadar gula darah tinggi. Jika tidak terkendali dapat memicu prediabetes hingga diabetes. Selain itu, kelebihan gula diubah menjadi lemak tubuh sehingga menyebabkan obesitas. "Gemuk karena lemak, bukan otot, sangat berbahaya karena menumpuk di organ vital seperti jantung, paru hingga ginjal," tambahnya.

Prof Hardinsyah juga melihat faktor lingkungan sekolah juga sering kali menyediakan jajanan tinggi gula. Karena itu, peran keluarga dan sekolah sangat penting dalam mengendalikan pola makan anak.

Program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilainya strategis untuk mengurangi kebiasaan jajan. "Kalau anak terbiasa membawa bekal sehat bersama-sama, mereka akan lebih termotivasi," katanya.

Selain keluarga dan sekolah, ia mengingatkan, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi gizi dengan membiasakan membaca label kemasan. Saat ini banyak orang belum memahami bahwa keterangan gizi di label sering ditulis per sajian, bukan per kemasan. "Jadi harus teliti agar tidak salah menghitung," ujarnya.

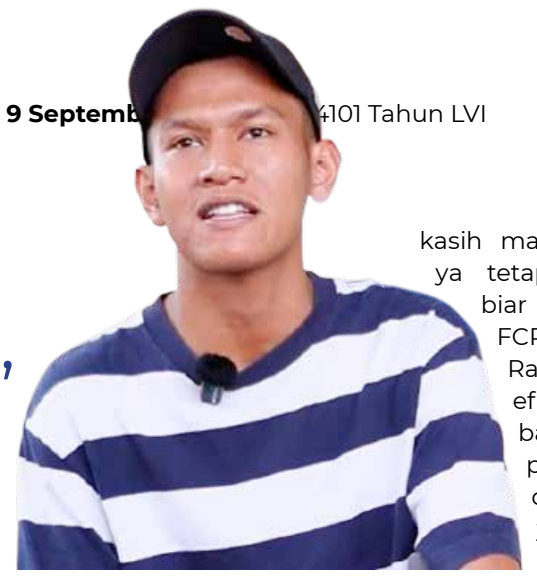
Karena itu, ia menganjurkan konsumsi sayur, buah, dan makanan bergizi seimbang sebagai alternatif pengganti makanan manis berlebih. Gula memang dibutuhkan tubuh, tetapi secukupnya. "Diversifikasi makanan dengan perbanyak sayur dan buah sangat baik untuk menjaga kesehatan sejak dini," pesannya.

Prof Hardinsyah juga mengingatkan masyarakat untuk selalu mengingat prinsip GGL (Gula, Garam, Lemak) yang dibatasi sesuai anjuran kesehatan. "Mari biasakan hidup sehat dengan mengendalikan konsumsi gula, karena pola makan baik dimulai dari rumah dan lingkungan terdekat," tuturnya. **Yul**

Rico Sukma

Tinggalkan Dunia Perbankan, **Terjun Beternak Bebek**

Rico Sukma tinggalkan pekerjaan mapan demi ternak bebek pedaging. Dari coba-coba kini panen ratusan ekor tiap minggu, bukti usaha kecil bisa mendatangkan keuntungan besar.



Tidak banyak orang berani meninggalkan pekerjaan mapan demi mengejar passion. Namun langkah berani itulah yang diambil Rico Sukma Febri Wijaya, mantan pegawai bank asal Sleman. Ia memilih banting setir menjadi peternak bebek pedaging, sebuah keputusan yang sempat membuat banyak orang meragukan. Tak jarang, ia dipandang sebelah mata.

Bagi Rico, pekerjaan di bank dengan gaji tetap, rutinitas monoton, dan kepuasan kerja yang minim, tak lagi memberi tantangan. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Saat masih bekerja, Rico sempat mencoba memelihara 100 ekor bebek pedaging. Awalnya, niatnya hanya menambah penghasilan. Tapi seiring waktu, ia mulai jatuh cinta pada dunia peternakan dan akhirnya memutuskan untuk fokus penuh pada usaha barunya.

Menjadi peternak bebek pedaging ternyata bukan perkara mudah. Rico mengaku sempat mengalami masa-masa sulit, terutama saat memelihara anak bebek atau day-old duckling (DOD). Tingkat kematian bisa mencapai 50 persen karena kurangnya pengalaman. Anak bebek yang lemah, terkena penyakit, atau tidak cocok dengan kondisi kandang, bisa berakibat rugi besar.

Selain itu, kondisi kandang menjadi tantangan tersendiri. Lembabnya tanah dan udara yang kurang sirkulasi bisa meningkatkan kadar amonia, berbahaya bagi kesehatan bebek. Untuk itu, Rico rajin membalik tanah, menyemprot desinfektan, menabur dolomit, hingga menambahkan serbuk gergaji agar kandang tetap kering dan nyaman. “Kalau kandang lembab, amonia naik. Itu bahaya banget buat bebek. Jadi harus rajin dirawat,” jelasnya.

Dari berbagai kegagalan itu, Rico belajar banyak. Ia aktif mencari ilmu dari sesama peternak, hingga rela mengikuti seniornya dari pagi sampai malam untuk menimba pengalaman. Dengan mengamati cara perawatan yang benar, mulai dari pemberian pakan hingga pengaturan suhu kandang, ia mulai memahami trik-trik penting dalam peternakan bebek pedaging.

Proses belajar yang tak kenal lelah ini menjadi fondasi bagi keberhasilan usaha peternakan yang dijalani.Selain belajar langsung dari pengalaman senior, Rico juga menemukan strategi unik, terutama dalam pakan. Ia mencampur pakan sendiri dengan bahan-bahan seperti kebi (sisa gilingan beras), tepung kentaki (endapan minyak gorengan ayam), dan konsentrat. Racikan ini terbukti lebih hemat, sekaligus mempercepat pertumbuhan bebek. “Kalau mau bebek cepat besar, kasih makan yang banyak. Cuma ya tetap harus diatur FCR-nya biar enggak boros,” jelas Rico. FCR atau Feed Conversion Ratio adalah indikator efisiensi pakan; semakin baik FCR, semakin optimal pertumbuhan bebek dibanding jumlah pakan yang diberikan.

Selain itu, Rico menerapkan sistem panen estafet. Dengan lima kandang yang dimilikinya, panen bisa dilakukan setiap minggu. Pola ini membuat arus kas lebih stabil, sehingga keuntungan bisa langsung diputar kembali untuk membeli bibit atau pakan, tanpa menunggu akumulasi panen dalam waktu lama.

Kini, usaha Rico berkembang pesat. Dalam sekali panen, ia bisa memanen ratusan ekor bebek dengan margin keuntungan sekitar Rp10.000 per ekor. Jika panen dilakukan setiap minggu dan jumlah bebek mencapai 400 ekor, omzet bulanan bisa mencapai Rp16 juta.

Selain menjual bebek siap panen, Rico juga memperluas usahanya dengan menjual DOD, pakan racikan, hingga membuka sharing session untuk anak muda yang tertarik menekuni dunia peternakan. Pendekatan ini membuatnya dikenal sebagai peternak bebek sukses di wilayah Sleman, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda yang ingin mencoba usaha serupa. **Gsh**





ROMINDO PRIMAVETCOM
selalu memberikan yang terbaik

Pilihan Lengkap Agar Ternak Sehat & Produktif

Biodin
Meningkatkan Kerja Otot & Daya Tahan Tubuh

Hematodin
Memacu Pertumbuhan & Pembentukan Sel Darah Merah

Vitadin 500
Vitamin AD3E Konsentrasi Tinggi. Untuk Penanganan & Pengobatan Defesiensi vitamin A, D3, E Serta Untuk Pertumbuhan Optimal

Ferrodin
Anti Anemia Khusus Anak Babi

Ivomec Super
Obat Anti Endoparasit & Ektoparasit Paling lengkap

Dovenix
Untuk Distomatosis & Haemonciacis

Duodin-LA
Antibiotika Spektrum Luas Bersifat Long Acting

Spiradin
Antibiotika Terbaik untuk Mastitis & Pneumonia

Terrexine
Obat Mastitis (Masa Laktasi)

Marbox
Quinolon Generasi Terbaru, Broad Spektrum

Vetrimoxin-LA
Amoxicillin Bersifat Long Acting

Cevaxel RTU
Mengandung Ceftiofur Hidroclhoride 50mg (Antibiotika Generasi Ketiga Cephalosporin)

Cevazuril OS
Toltrazuril Oral Suspensi untuk Pencegahan & Pengobatan Coccidiosis

Enzaprost-T
Prostaglandin Natural

Altresyn
Oral Solution Altrenogest untuk Sinkronisasi Estrus

Pestiffa
Vaksin Aktif terhadap Penyakit Hog Cholera

Rabisin
Vaksin Inaktif Rabies untuk Carnivora & Herbivora

Circovac
Vaksin babi untuk PCV2 (Porcine CircoVirus Type 2), Yang Pertama Teregristasi untuk Induk (Sow) & Anak (Piglet)



UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT, SILAHKAN HUBUNGI:
PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
JL. Dr. Saharjo 264 - Jakarta 12870
Telepon. (021) 8300 300

Jagung Analog, Menyiasati Gejolak Harga Pakan Ternak



Ketersediaan jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak kembali menjadi sorotan. Dalam sebulan terakhir, harga jagung di sejumlah sentra produksi mengalami kenaikan yang dikhawatirkan membebani peternak unggas. Pakar dari IPB University memberikan solusi dengan jagung analog.

Jagung merupakan komponen utama dalam formula ransum Ayam atau unggas. Pemakaian jagung dalam ransum unggas tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kerangka Sampel Area (KSA) Jagung, luas panen Januari–September 2025 mencapai 2,11 juta ha dengan produksi jagung pipilan kering (JPK) kadar air 14% sebanyak 12,13 juta ton.

Untuk periode Juli–September saja, luas panen diperkirakan 610 ribu hektar dengan potensi produksi 3,60 juta ton. Neraca jagung nasional 2025 menunjukkan surplus. Dari total ketersediaan 19,55 juta ton dan kebutuhan 14,95 juta ton, kita berpotensi surplus sekitar 4,6 juta ton.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, memastikan berbagai langkah antisipatif sudah disiapkan. Mulai dari imbauan kepada industri pakan agar tidak menaikkan harga, pemetaan peternak calon penerima cadangan jagung pemerintah, hingga mempertemukan kelompok tani dengan pemasok jagung.

Kementan juga menggandeng Satgas Pangan untuk mengawal distribusi sekaligus mencegah praktik penimbunan jagung oleh oknum pedagang. “Langkah-langkah ini kami ambil untuk memastikan pasokan jagung dan pakan tetap stabil. Tujuannya jelas, agar peternak tidak terbebani biaya tinggi dan masyarakat tetap bisa membeli produk unggas dengan harga terjangkau,” kata Agung.

Menurut Agung, hasil perhitungan internal Ditjen PKH menunjukkan bahwa harga bahan baku pakan tambahan seperti Soybean Meal (SBM) dan Meat Bone Meal (MBM) masih stabil. Artinya, meskipun harga jagung sebagai komponen utama pakan naik, biaya produksi pakan secara keseluruhan belum mengalami lonjakan signifikan.

Jagung dari Sagu dan Singkong

Melihat situasi ini, Dr Heri Ahmad Sukria, dosen Fakultas Peternakan IPB University menawarkan inovasi “jagung analog” sebagai pengganti jagung dalam pakan ternak. Terobosan ini diharapkan mampu menurunkan biaya pakan dalam produksi ternak unggas dan akhirnya menurunkan harga daging ayam sehingga lebih terjangkau di pasaran.

Jagung analog adalah produk bahan pakan pengganti jagung yang memiliki nilai gizi serupa namun berbahan dasar non-jagung, seperti sagu parut dan singkong. Inovasi ini telah berhasil diuji coba pada ayam kampung dalam skala laboratorium. Hasilnya, ayam kampung yang diberi jagung analog menunjukkan performa yang sama baiknya dengan yang mengonsumsi ransum jagung konvensional.

“Sekitar 50 persen dari pakan unggas bersumber dari jagung. Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan jagung nasional dari produksi dalam negeri dan saat ini sudah tidak boleh impor,” ungkap Heri seperti dikutip dari *laman IPB University*.

Akibatnya, harga jagung terus naik, paling rendah mencapai Rp 5.500 bahkan pada bulan-bulan di luar musim panen, harga jagung bisa mencapai Rp7.000 dibeberapa wilayah, khususnya di daerah terpencil atau kepulauan. “Hal ini berdampak langsung pada tingginya harga ransum ayam dan harga ayam di pasar,” katanya.

Berbeda dengan negara-negara seperti Amerika dan Eropa yang menggunakan beragam bahan sebagai sumber energi pakan, Indonesia masih sangat tergantung pada jagung. Heri melihat sagu parut memiliki sebagai potensi besar yang selama ini terabaikan.

Indonesia memiliki luasan lahan tanaman sagu sekitar 5 juta ha lahan sagu di Papua, atau sekitar 99 persen dari total luas lahan sagu nasional. Namun pemanfaatannya masih sangat rendah, yakni di bawah 5 persen. “Sagu bisa langsung dipanen dari tanaman sagu namun harus memperhatikan keseimbangan lingkungan kawasan tanaman sagu, sehingga sangat potensial sebagai pakan ternak sumber energi pengganti jagung,” ungkapnya.

Selain sagu, singkong juga menjadi bahan menjanjikan karena bisa ditanam di banyak daerah seperti Lampung dan Jawa Barat. Tantangan utamanya adalah rendahnya produktivitas dan tingginya biaya produksi.

“Untuk menjadikan singkong sebagai bahan pakan yang ekonomis, produktivitasnya harus mencapai minimal 40 ton/ha dan beberapa varietas unggul dari IPB University saat ini sudah mampu memenuhi target tersebut,” ungkapnya.

Jagung analog yang dikembangkan Dr Heri dan tim telah melalui berbagai tahap riset dan uji coba, baik di laboratorium maupun di lapangan. Untuk meningkatkan utilitasnya agar setara dengan jagung, maka salah satu proses penting adalah ekstrusi, yaitu teknik proses menggunakan metoda hydrothermal untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia serta utilitas bahan pakan.

Selain mengandung sumber karbohidrat dari sagu dan singkong, jagung analog juga ditambahkan bahan lain yang kaya protein dan nutrient mikro. Bahkan ekstrak daun kelor digunakan sebagai sumber beta-karoten, vitamin dan mineral mikro. Hasil uji coba pada ayam kampung menunjukkan performa yang baik. Tahun ini, uji coba juga akan dilakukan pada ayam broiler setelah proses ekstrusi selesai.

Pada tahun ini, proyek ini telah mendapatkan pendanaan dari Program Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI dalam rangka diseminasi dan penerapan kepada masyarakat. Dengan skala produksi yang lebih besar, jagung analog diharapkan bisa menjadi solusi nyata bagi peternak kecil.

“Biaya pakan yang lebih murah akan menurunkan harga produksi ayam, sehingga konsumen juga bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau,” kata Heri. Bahkan dirinya berharap inovasi ini bisa segera dikomersialisasikan dan menjadi alternatif pakan ternak yang murah, mudah diproduksi, dan berbasis bahan lokal. Keberhasilan ini bisa menjadi salah satu terobosan besar dalam sektor peternakan Indonesia.

Inovasi jagung analog tidak hanya mengurangi ketergantungan impor jagung, tetapi juga memberdayakan sumber daya lokal yang selama ini belum optimal dimanfaatkan. Sagu Papua dan singkong daerah bisa menjadi kunci kemandirian pakan ternak nasional. **Yul**

Tips Pruning Pohon Alpukat agar Cepat Berbuah



Pemangkasan atau pruning pada pohon alpukat sangat penting untuk merangsang pertumbuhan tunas baru yang produktif, mempercepat berbuah, serta menjaga kesehatan dan bentuk pohon. Berikut beberapa tips berdasarkan sumber terpercaya:

1. Waktu yang Tepat

Lakukan pemangkasan saat pohon dalam kondisi dorman, yaitu akhir musim dingin hingga awal musim semi. Pada saat ini, pertumbuhan belum aktif sehingga luka potong cepat sembuh dan tidak mengganggu proses pembungaan. Hindari pemangkasan berat di musim panas atau gugur karena dapat menyebabkan stres dan pertumbuhan pucuk yang lemah.

2. Pangkas Cabang Mati dan Rusak

Buang segera cabang yang mati, patah, atau terserang penyakit. Ini mencegah penyebaran hama dan membantu pohon mengalihkan energi ke bagian sehat yang berpotensi berbuah.

3. Buka Tajuk Pohon

Pangkas cabang yang tumbuh ke dalam atau saling tumpang tindih. Tujuannya untuk membuka kanopi agar cahaya matahari dan sirkulasi udara masuk ke seluruh bagian pohon. Cahaya sangat penting dalam merangsang pembentukan bunga dan buah.

4. Pendekkan Ujung Cabang (*Heading Cuts*)

Pemangkasan ujung cabang akan merangsang pertumbuhan tunas samping. Ini membuat pohon lebih rimbun dan menghasilkan lebih banyak titik tumbuh bunga. Lakukan pemangkasan ringan, cukup 10–20 cm dari ujung.

5. Jangan Pangkas Terlalu Banyak

Pemangkasan berlebihan dapat menyebabkan stres dan menghambat pembentukan buah. Sebaiknya lakukan secara bertahap, maksimal satu cabang besar per tahun. Fokus pada peremajaan cabang yang tua.

6. Gunakan Alat Tajam dan Bersih

Gunakan gunting, lopper, atau gergaji kecil yang tajam dan steril. Potongan bersih dengan sudut 45 derajat meminimalkan risiko infeksi. Sterilisasi alat sebelum dan sesudah digunakan.

7. Kontrol Tinggi Pohon

Pangkas cabang vertikal berlebih agar tinggi pohon tetap terjangkau. Struktur ideal berbentuk kerucut atau piramida agar semua bagian terkena cahaya secara merata.

Pemangkasan pohon alpukat secara tepat akan mempercepat proses berbuah, menjaga struktur pohon, dan mencegah penyakit. Lakukan rutin setiap tahun, dengan memperhatikan waktu dan teknik yang benar. Dengan perawatan yang konsisten, pohon alpukat Anda akan tumbuh subur dan produktif.

Herman

Komersialisasi E-PAPER Sinartani

Tabloid Sinartani | Tabloid sinartani.com | SINTA TV

E-paper Sinartani sudah berjalan selama 2 tahun dan memberikan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan Sinartani versi cetak. E-paper Sinartani terbit tiap minggu, 48 kali setahun, terdiri dari 20-24 halaman sekali terbit. Informasinya mencakup issue-issue yang lebih melebar, selain pertanian juga mencakup informasi umum dan humaniora.

Sampai saat ini e-Paper Sinartani masih didistribusikan secara gratis ke semua penyuluh. Kini, waktunya E-Paper yang sudah dikenal oleh penyuluh dan petani itu mulai dijual secara komersil dengan harga yang teramat murah, yaitu Rp 1.500/edisi atau Rp 72.000/tahun.

Mudah-mudahan upaya ini merupakan sinergi yang baik antara pembaca dengan penerbit Sinartani yang tidak henti-hentinya berupaya meningkatkan kualitas Sinartani agar lebih bermanfaat dan sekaligus memberi bahan bacaan yang baik bagi pembacanya.

Para pembaca yang ingin berlangganan dipersilahkan mengirimkan nama dan nomor HP-nya, melalui WhatsApp ke Sdr Wawan (081216304232) serta mentransfer biaya tahunan sebesar Rp 72.000 ke Rekening Sinartani: Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413



BERLANGGANAN
E-paper Tabloid Sinartani

Hanya dengan
Rp. 72.000 / Tahun

HUBUNGI :
0813 1757 5066
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

KAMI MENJANGKAU LEBIH LUAS

www.tabloidsinartani.com | tabloidsinartani.com | tabloidsinartani.com | @SinarTaniST | tabloidsinartani | SINTA TV

Perbaiki Beras Turun Mutu, **Bulog Lakukan Reproses**



Isu penolakan beras SPHP oleh masyarakat membuat Perum Bulog melakukan reproses beras yang mulai turun mutu. Langkah tersebut sebagai upaya menjaga agar kualitas cadang beras pemerintah tetap terjaga.

Kualitas beras SPHP yang pemerintah jual dalam setiap Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan harga Rp 62.500/5 kg mendapat keluhan di masyarakat. Bukan hanya beras tersebut rasanya pera, tapi juga ada yang setelah di masyarakat baunya kurang sedap. Disinyalir penurunan mutu beras tersebut, karena tersimpan telalu lama di Gudang Bulog.

Seperti diketahui pertengahan tahun 2025, pemerintah mengungkap stok beras di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton. Jumlah tersebut berasal dari *carry over* beras impor tahun 2024 ditambah pengadaan dalam negeri yang mencapai 2,6 juta ton.

Saat ini Perum BULOG menguasai stok beras sebanyak 3,9 juta ton. Jumlah tersebut setelah dikurangi penyaluran beras untuk GPM yang ditargetkan hingga akhir tahun 2025 sebanyak 1,3 juta ton dan bantuan pangan untuk dua bulan berturut-turut Juli-Agustus.

Dari jumlah tersebut, sekitar 2,95 juta ton atau 75 persen merupakan hasil pengadaan dalam negeri. Sedangkan sisanya berasal dari pengadaan luar negeri berdasarkan penugasan Pemerintah akhir tahun 2024.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG, M. Suyamto mengatakan, dari total stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini dikuasai BULOG, yaitu 3,9 juta ton beras, terdapat beras yang mendapatkan prioritas untuk segera dilakukan langkah reproses.

"Reproses yaitu langkah yang dilakukan sebagai tindakan perbaikan beras agar kualitas terjaga, dapat disalurkan dan layak untuk dikonsumsi. Jumlahnya kurang dari 0,1% dari total stok yang kami kelola saat ini," ujar Suyamto menyikapi pemberitaan yang beredar mengenai kualitas beras BULOG.

Suyamto menegaskan, seluruh stok yang dikelola BULOG dijaga secara ketat agar tetap memenuhi standar kualitas dan layak konsumsi. Dalam menjaga kualitas beras di gudang, BULOG memiliki prosedur pemeliharaan beras di gudang secara berkala.

Bahkan menurutnya, Bulog memiliki mekanisme pengendalian mutu yang ketat melalui sistem Pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT). Misalnya dengan melakukan berbagai tindakan perawatan secara rutin, mulai dari spraying untuk pencegahan hama, fumigasi apabila terdapat indikasi serangan hama, hingga monitoring harian terhadap kondisi gudang dan lingkungan penyimpanan.

"Pemeriksaan laboratorium juga dilakukan untuk memastikan kelayakan konsumsi. Semua langkah ini merupakan bentuk komitmen BULOG dalam memastikan stok beras yang dikelola tetap higienis, aman, dan bermutu," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani menambahkan, BULOG memastikan bahwa seluruh beras yang disalurkan untuk program pemerintah, baik melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun Bantuan Pangan (Banpang), selalu melalui pemeriksaan kuantitas dan kualitas sebelum dilakukan pengemasan ulang.

"BULOG berkomitmen untuk memastikan beras yang sampai ke masyarakat selalu dalam kondisi baik dan layak konsumsi," ujar Rizal.

Untuk menjamin keamanan pangan, Rizal juga menegaskan, BULOG secara periodik melakukan pemeriksaan kualitas beras di laboratorium terakreditasi nasional. Pengujian laboratorium terakhir yang dilakukan pada Agustus 2025, yaitu Laboratorium PT. Saraswanti Indo Genetech dan Laboratorium PT. Sucofindo. Hasil pengujian menunjukkan bahwa beras yang disimpan di gudang BULOG memiliki kandungan yang masih memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Sebagai BUMN pangan yang mendapat mandat menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional, Perum BULOG berkomitmen untuk terus memastikan bahwa beras yang dikelola dan disalurkan berada dalam kondisi terbaik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap ketersediaan, keterjangkuan dan kualitas pangan nasional tetap terjaga. **Yul**

Panen di 10 Provinsi, Mentan: **Harga Naik karena Anomali**

Pemerintah memastikan kondisi pasokan beras nasional sangat aman dan terkendali seiring dengan berlangsungnya panen raya di berbagai wilayah. Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa potensi luas panen dan produksi gabah kering giling (GKG) selama periode Agustus–Oktober 2025 menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan rilis Berita Resmi Statistik pada 1 September 2025, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Pudji Ismartini, menjelaskan produksi padi dari Agustus hingga Oktober 2025 diperkirakan sebesar 15,80 juta ton GKG, naik 4,16 dari periode yang sama tahun lalu. Secara kumulatif, total produksi padi dari Januari hingga Oktober 2025 diperkirakan mencapai 53,87 juta ton GKG, meningkat 12,17%.

Kenaikan produksi ini didorong oleh bertambahnya luas panen yang signifikan. Panen raya tersebar di 10 provinsi dan 10 kabupaten/kota dengan potensi luas panen tertinggi. Data BPS menunjukkan bahwa panen raya terkonsentrasi di sejumlah sentra produksi padi.



Total potensi luas panen pada periode Agustus-Oktober 2025 tersebar di 10 provinsi dengan potensi terbesar, antara lain di Pulau Jawa—terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat—serta Banten. Selain itu, potensi panen besar juga ada di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan.

Panen tersebut juga terjadi di 10 kabupaten/kota dengan potensi panen tertinggi pada September ini, di antaranya Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (potensi produksi GKG mencapai 235,57 ribu ton), Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Selatan (potensi produksi GKG mencapai 97,94 ribu ton), Kabupaten Indramayu, Jawa Barat (potensi produksi GKG mencapai 113,46 ribu ton).

Menanggapi gejolak harga yang masih terjadi, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kenaikan harga beras adalah sebuah anomali dan bukan disebabkan oleh kurangnya produksi.

"Alhamdulillah, produksi beras kita aman. Ketahanan pangan kita cukup aman. Bahkan, kami mencatat surplus hingga 3,7 juta ton hingga Oktober ini, sesuai dengan data BPS. Ini adalah hasil kerja keras petani. Kenaikan harga ini anomali, dan kami akan perbaiki bersama," ujar Menteri Amran.

Pemerintah, melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog, akan terus mengaktifkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh wilayah Indonesia.

"Dengan melimpahnya hasil panen, kami memastikan pasokan beras SPHP akan terus membanjiri pasar. Kami akan menjamin beras dengan harga terjangkau tersedia di pasar tradisional, ritel modern, hingga warung-warung kecil. Tidak ada alasan bagi harga beras untuk naik, karena stok kita sangat aman," tegasnya.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. "Kami menjamin ketersediaan stok, dan kami akan menindak tegas pihak-pihak yang sengaja menimbun atau melakukan spekulasi yang merugikan masyarakat," katanya. **Yul**

Membangkitkan Kembali
Tambak Pantura yang Terpuruk

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan kini tengah menggenjot revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa Barat. Dengan revitalisasi ini diharapkan akan mendongkrak produksi perikanan.



Revitalisasi Tambak Ikan di Pantura Jawa Barat ini dilaksanakan pada areal yang skema pengelolaannya berupa Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 274 Tahun 2025. Total luas lahannya mencapai 20.413,25 ha yang tersebar di 4 kabupaten di Jawa Barat yaitu di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Rinciannya Kabupaten Bekasi seluas 8.188,49 ha di Kecamatan Babelan, Cabangbungin, Muaragembong, Tarumajaya. Di Kabupaten Karawang seluas 6.979,51 ha di Kecamatan Batujaya, Cibuaya, Cilamaya Wetan, Pakisjaya, Tirtajaya.

Sementara di Kabupaten Subang seluas 2.369,76 ha yang berada di Kecamatan Blanakan, Legonkulon, Pusakanagara dan Sukasari. Terakhir, Kabupaten Indramayu seluas 2.875,48 ha di Kecamatan Cantigi, Kandanghaur, Losarang, Pasekan dan Sindang.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu dalam siaran resmi KKP mengatakan, terdapat sekitar 78.550 hektar (ha) tambak idle lebih dari 30 tahun yang masih dikelola secara tradisional tanpa tandon dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Bahkan produktivitasnya sangat rendah, rata-rata hanya 0,6 ton/ha/tahun.

Melalui revitalisasi, KKP menargetkan pengelolaan 20.000 ha tambak modern dengan konsep integrasi dan keberlanjutan, mencakup pembangunan tandon, IPAL, rekonstruksi kolam, penggunaan benih unggul, pakan berkualitas, serta pemanfaatan teknologi terkini.

Dalam program revitalisasi tambak di Pantura ini, KKP terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah serta Kementerian/Lembaga. Salah satu langkah penting yakni terus melakukan sosialisasi bersama untuk menyampaikan penetapan kawasan hutan ketahanan pangan seluas kurang lebih 20.413,25 hektare dari Kementerian Kehutanan.

"Ini merupakan salah satu tahapan penting yang telah dilakukan KKP. Sebelumnya, juga telah dilaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahap I dan II guna memastikan bahwa pelaksanaan program ini ramah lingkungan dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Tb Haeru.

Dirjen yang akrab disapa Tebe tersebut menjelaskan, sosialisasi telah beberapa kali dilakukan. Kegiatan terbaru melibatkan 18 camat dan 49 kepala desa serta kepala dinas kelautan dan perikanan dari empat kabupaten di Jawa Barat, yaitu Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Tebe menambahkan bahwa dalam waktu dekat KKP masih akan melaksanakan sosialisasi lanjutan kepada masyarakat di 49 desa yang masuk dalam cakupan wilayah program. Selain itu, dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta empat pemerintah kabupaten.

"Berbagai tahapan akan terus kami jalankan. Kami berharap pada tahun ini dapat dilakukan ground breaking sebagai simbol dimulainya tahapan pelaksanaan program revitalisasi tambak di Pantura Jabar," katanya.

Tebe berharap dengan revitalisasi tambak akan tumbuh industri berupa penyediaan induk, sarana budidaya seperti plastik HDPE, kincir, pompa, pakan, obat-obatan, hingga dukungan industri hilir untuk memperluas pasar ekspor maupun memperkuat konsumsi domestik.

Program revitalisasi ini juga menerapkan manajemen berbasis teknologi yang terkini, seperti silo autofeeder, wave-breaker, hingga root blower. Tahapan budidaya dilakukan mulai dari pendederan awal (0,2–5 gram), pendederan akhir (5–100 gram), hingga pembesaran (100–1.000 gram).

Transformasi Sistem Budidaya

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Tinggal Hermawan mengatakan, program ini akan memberikan dampak besar terhadap transformasi sistem budidaya di kawasan tersebut. Menurutnya, sebagian besar lahan yang menjadi target revitalisasi sebelumnya merupakan tambak idle atau tidak produktif.

Selain itu, sistem budidayanya masih tradisional, tidak memiliki tandon maupun (IPAL), serta memiliki tingkat produktivitas yang sangat rendah. "Melalui program ini, kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi area budidaya perikanan yang bernilai tinggi dan berkelanjutan, khususnya untuk komoditas ikan nila salin," kata Tinggal.

Ia berharap program revitalisasi ini dapat meningkatkan produktivitas serta mendukung kebijakan swasembada dan ketahanan pangan. Selain itu, revitalisasi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Dengan luas lahan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan mencapai kurang lebih 20.413,25 ha, program ini diproyeksikan mampu menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 119.100 orang di sektor hulu, on farm hingga hilir," lanjut Tinggal.

Sementara itu, Direktur Ikan Air Laut, Ikhsan Kamil menambahkan, program revitalisasi akan berfokus pada Budidaya Terintegrasi (Integrated Tilapia Farming) yaitu hulu – on farm – hilir dalam satu ekosistem yang terintegrasi, berkolaborasi dengan private sektor, pemerintah daerah masyarakat penggarap dan industri pendukung.

Setiap kabupaten akan dikembangkan melalui sistem kluster budidaya modern dan mandiri yang dilengkapi dengan dengan industri hulu dan hilir seperti hatchery untuk penyediaan benih unggul, pabrik pakan, pabrik pengolahan, cold chain facilities, dan industri lain. "Target luasan per klaster sekitar 1.000 ha," katanya.

Sementara itu Kepala Desa Pantai Harapanjaya Kecamatan Muara gembong Kabupaten Bekasi, Mahir menyampaikan, masyarakat petambak setempat sangat antusias dan menyambut baik program ini. Harapannya program revitalisasi dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petambak.

Lebih lanjut Mahir menjelaskan, wilayahnya memiliki potensi sumber daya alam yang sangat mendukung, terutama dari sisi ketersediaan air tawar dan air laut, sehingga cocok untuk pengembangan budidaya ikan nila salin. "Dipilihnya ikan nila salin sebagai komoditas utama program ini sangat tepat. Ikan tersebut mudah dibudidayakan di wilayah kami dan memiliki pasar yang terbuka luas, baik domestik maupun ekspor," tegas Mahir. **Yul**